



LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, memungkinkan kami menyelesaikan sehingga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025, Dokumen ini memuat informasi mengenai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dengan memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna selama tahun berjalan serta merupakan bentuk evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Dengan Berpedoman Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berupaya menjaga akuntabilitas dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk masyarakat. Laporan ini juga menjadi alat evaluasi internal. Kami menyadari kekurangan dalam penyusunannya dan mengharapkan masukan konstruktif untuk peningkatan kinerja ke depan.

Natuna, Januari 2026

Kepala Dinas

Ikhwan Solihin, SE., MA
NIP. 19711208 200003 1 005

DAFTAR ISI

BAB I	
Pendahuluan.....	5
I.1 Latar Belakang.....	5
I.2 Maksud dan Tujuan.....	7
I.3 Struktur Organisasi.....	9
I.4 Permasalahan Strategis di bidang Komunikasi dan Informatika.....	12
I.5 Sistematika Penyajian.....	16
BAB II	
Perencanaan Kinerja.....	19
II.1 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026.....	19
II.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	28
II.3 Perjanjian Kinerja.....	34
II.4 Pengukuran Kinerja.....	34
BAB III	
Akuntabilitas Kinerja.....	38
III.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	38
III.2 Capaian Kinerja Anggaran.....	86
BAB IV	
IV Penutup.....	92
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	95
Lampiran II Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	96
Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	97

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.....	3
Tabel 2	Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran serta Target Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna yang tercantum didalam RPJMD.	21
Tabel 3	Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024	21
Tabel 4	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	22
Tabel 5	Sasaran, indikator kinerja sasaran, indikator program Pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian 2021-2026.....	23
Tabel 6	Sasaran, indikator kinerja sasaran, indikator program Pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 2021-2026.....	24
Tabel 7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024....	31
Tabel 8	Keterkaitan Sasaran RPJMD, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	32
Tabel 9	IKK Pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	33
Tabel 10	IKK Pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	33
Tabel 11	IKK Pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	33
Tabel 12	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2024.....	35
Tabel 13	Rencana Aksi Diskominfo Natuna Tahun 2024.....	40
Tabel 14	Lima tujuan utama dengan indikator tujuan dalam Rencana Strategis Tahun 2024.....	41
Tabel 15	Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Pertama Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	42
Tabel 16	Perbandingan pencapaian Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 s/d 2024.....	44
Tabel 17	Predikat Indeks SPBE.....	44
Tabel 18	Domain dan Aspek penilaian Indeks SPBE.....	44
Tabel 19	Data Media Sosial Yang Digunakan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.....	45
Tabel 20	Perbandingan Hasil Indeks Pelayanan Publik 2022 s/d 2024 Diskominfo Natuna.	51
Tabel 21	Indikator Kinerja Utama 1 & Formulasi Perhitungannya Dalam Pencapaian Kinerja.....	52
Tabel 22	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran IKU 1 Tahun 2024.....	52
Tabel 23	Rekapan Aset Tetap TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna.....	53
Tabel 24	Rekapitulasi Data Akses Internet Titik Layanan Publik (Puskesmas, Sekolah dan Ruang Publik/Perkantoran).....	56
Tabel 25	Rekapan Jumlah Menara OPSEL/BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna	57
Tabel 26	Data Kualitas Layanan BTS/OPSEL Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna	58
Tabel 27	Desa dan Kelurahan yang dapat Mengakses Internet	60
Tabel 28	Data Opd Yang Tersedia Layanan Akses Internet/Masuk Dalam Jaringan Intra Pemkab Natuna, Serta Opd Yang Mengelola Domain Dan Sub Domain tahun 2024.....	64
Tabel 29	Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Aplikasi Umum Kabupaten Natuna.....	67
Tabel 30	Data Website Pemerintah Kabupaten Natuna.....	67
Tabel 31	Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Kedua Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.....	67
Tabel 32	Indikator Kinerja Utama 2 & Formulasi Perhitungannya Dalam Pencapaian Kinerja.....	67
Tabel 33	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024.....	68
Tabel 34	Rekapitulasi Data dan perbandingan Kunjungan Website.....	68
Tabel 35	Rekapitulasi Berita/Informasi Per Triwulan Tahun 2024.....	70
Tabel 36	Perbandingan Jumlah Berita Tahun 2022 s/d 2024.....	70
Tabel 37	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP dan Kecamatan Kab.Natuna	71

Tabel 38	Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Ketiga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	72
Tabel 39	Indikator Kinerja Utama 3 & Formulasi Perhitungannya Dalam Pencapaian Kinerja.....	72
Tabel 40	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024.....	72
Tabel 41	Kategori Capaian Kinerja.....	74
Tabel 42	Hasil Evaluasi Manajemen Kinerja.....	75
Tabel 43	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	75
Tabel 44	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Predikat/Nilai LAKIP Tahun 2024.....	75
Tabel 45	Nilai Persepsi, nilai interval, nilai interval koversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan.....	77
Tabel 46	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2024.....	79
Tabel 47	Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran Misi Rencana Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Natuna.....	80
Tabel 48	Keterkaitan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	80
Tabel 49	Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2024 Terhadap Target Akhir Renstra serta capaian kinerja renstra (%) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada Tahun 2024.....	81
Tabel 50	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran per Sasaran.....	87
Tabel 51	Realisasi Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	88
Tabel 52	Akuntabilitas Keuangan berdasarkan Indikator Program.....	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Belanja Anggaran dan Realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 s/d 2023.....	4
Grafik 2	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.....	10
Grafik 3	Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Per Desember 2024).....	11
Grafik 4	Jumlah SDM TIK Diskominfo Natuna (Per 31 Desember 2024).....	12
Grafik 5	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2022 s/d 2024.....	53
Grafik 6	Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
Grafik 7	Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	77
Grafik 8	Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	78
Grafik 9	Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	78
Grafik 10	Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra yang Menjadi Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKU).....	83
Grafik 11	Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra Meningkatkan Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik (IKU).....	84
Grafik 12	Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas (IKU).....	84
Grafik 13	Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra (Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah).....	85
Grafik 14	Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat)..	85
Grafik 15	Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 s/d 2024.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Penjabaran dan Penyelarasan sasaran Strategis dan IKU serta Target (Casscading Diskominfo Kab.Natuna Tahun 2024).....	29
----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	95
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	96
Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan pergantian dan perubahan pada RPJMD Kabupaten Natuna Untuk periode 2026-2030 yang menggantikan RPJMD 2021-2026 dan dengan terpilihnya Kepala Daerah untuk periode 2025-2029, Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berupaya menyesuaikan dengan telah disusunnya Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 yang merupakan Dokumen yang akan menjadi pedoman penyusunan Laporan ini yang disesuaikan dengan visi dan misi serta dengan menetapkan tujuan, sasaran dan indikator dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan dalam pencapaian kinerja yang tertuang dalam tujuan dan target dari Rencana Strategis serta efisiensi penggunaan anggaran dan berusaha dalam peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan publikasi informasi dalam pelayanan publik dalam hal ini mencakup Penataan Akses Jaringan dan Akses Internet Publik berbasis Integrasi, Penyediaan Data Statistik Sektoral yang terintegrasi, Peran Serta Dalam Persandian dan pengamanan Informasi, Pengelolaan Platform/Kanal Komunikasi Publik, Pengembangan Kemitraan Media, Informasi Pengelolaan Aspirasi Publik dengan tujuan yang diarahkan untuk *"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital"*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan

Dinas Type C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai dengan kewenangannya. Adapun uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- Uraian Tugas
 - 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan kewenangan lingkup tugasnya;
 - 2) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-Government, persandian dan statistik;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - 4) Menetapkan kerja sama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
 - 5) Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

- 6) Menetapkan operasional administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkungan dinas;
- 7) Menetapkan operasional pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan penyelenggaraan e-Government, persandian dan statistik;
- 8) Menetapkan rekomendasi/perizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 9) Membina Sumber Daya Manusia di lingkungan dinas dengan memfasilitasi peningkatan kinerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- 10) Pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-government dan tugas lainnya di lingkungan dinas;
- 11) Menilai hasil kerja pegawai di lingkungan dinas;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan secara berkala sebagai akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Fungsi

- 1) Merumuskan dan/atau menetapkan regulasi dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan program di lingkungan dinas ;
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;

- 4) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
- 5) Mengevaluasi penyelenggaraan kinerja pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, serta tugas lainnya di lingkungan dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Setelah memahami tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, disusun Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dan Kepala Dinas (Eselon II), yang selanjutnya dijabarkan melalui perjanjian kinerja antara Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III guna menjamin efektivitas, keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kejelasan pembagian tanggung jawab hingga kepada pejabat yang membidangi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 kepada Bupati Natuna dan para pemangku kepentingan, disusun Laporan Kinerja (LKj) yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika, memudahkan pengendalian

intern, dan menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien dalam operasional, serta pelaksanaan akan program, kegiatan dan subkegiatan yang dimulai dari perencanaan, penentuan target dan pencapaian kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini adalah untuk menyediakan informasi kinerja yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian tujuan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik Tahun 2025, mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan, menjamin penggunaan anggaran yang efisien dan efektif, memproyeksikan perkembangan organisasi di masa mendatang, serta mewujudkan pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berorientasi pada hasil, baik output maupun outcome.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini disusun dengan landasan hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan 88 tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Permenpan 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Permenpan 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan peraturan daerah nomor 16 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.
12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama
13. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2025 tentang kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penilaian kinerja organisasi

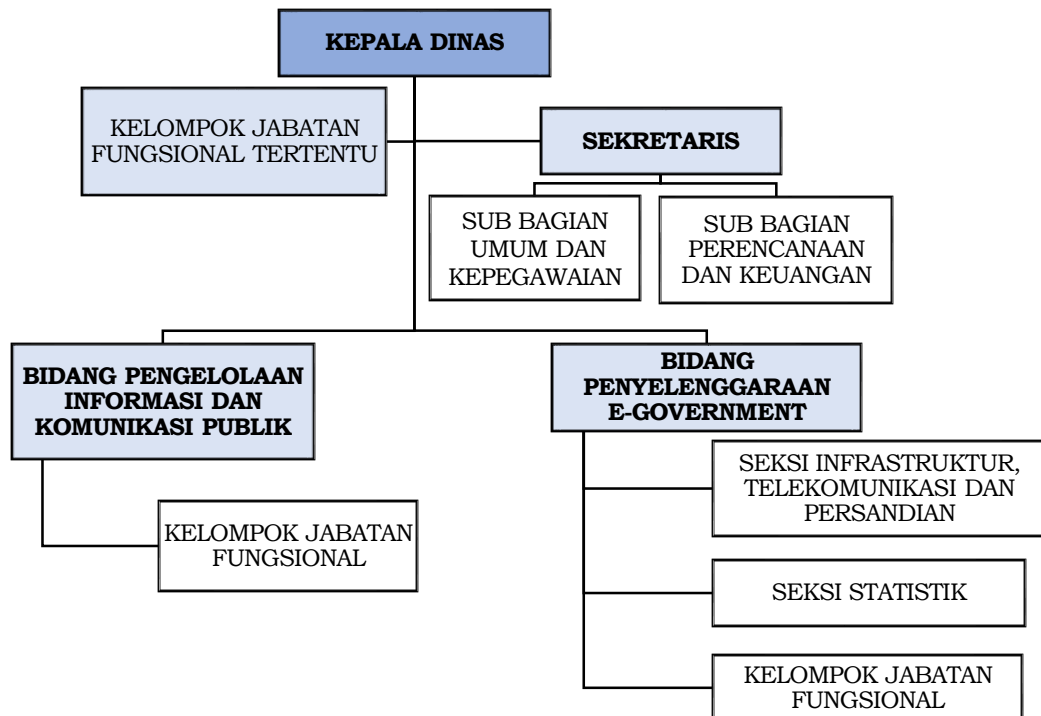
I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian.
 - 2) Seksi Statistik.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar I.1.

Gambar.I.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna



I.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna didukung oleh 44 orang pegawai ASN (PNS 23 Orang PPPK 6 orang) dan 15 orang Non ASN (data per 30 Juni 2025) mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 54 orang dikarenakan adanya pindah tugas ASN dan adanya efisiensi anggaran untuk pegawai Non ASN. Dari jumlah 44 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Terdiri dari 23 orang PNS, 6 Orang PPPK, 15 orang Non ASN. Adapun untuk tingkat Pendidikan sebagai berikut:

1. S2 (2 Orang Laki-Laki),
2. S1 (17 Orang Laki-Laki, 6 Orang Perempuan)
3. D3 (2 Orang Perempuan)

I.5. Aset

Aset tetap yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 12.273.237.589,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14.

Aset Tetap Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna

KODE	NAMA	UNIT	SALDO
1.3.1.	TANAH		69.693.800,00
1.3.1.02.02.	Tanah		69.693.800,00
1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN	3	10.219.060.080,00
1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	4	815.364.500,00
1.3.2.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	2	12.890.000,00
1.3.2.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	1.350.000,00
1.3.2.05.01.	Alat Kantor	15	173.150.000,00
1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	138	512.190.000,00
1.3.2.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31	120.877.000,00
1.3.2.06.01.	Alat Studio	62	3.909.515.000,00
1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	27	171.930.000,00

KODE	NAMA	UNIT	SALDO
1.3.2.08.08.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	7	39.920.000,00
1.3.2.10.01.	Komputer Unit	51	3.417.347.480,00
1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer	71	1.045.426.100,00
1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN		7.412.993.109,00
1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja		7.412.993.109,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN		(5.428.809.399,11)
	AKUMULASI PENYUSUTAN		(5.428.809.399,11)
JUMLAH		409	12.273.237.589,89

Sumber Data : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna (Desember 2024)

I.6. Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencapai Tujuan RPJMD dan Sasaran Renstra

1.6.1 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencapai Tujuan RPJMD 2021 – 2025 dan Sasaran Renstra Renstra 2021 – 2025

Untuk Medukung Pencapaian Visi, Misi pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2025 yaitu :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai dan Kultur

Misi : 6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)
7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Maka Disusunlah Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Digital Pemerintah Daerah

2. Meningkatnya Aplikasi Pelayanan Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
3. Meningkatkan Kualitas Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan
6. Mengoptimalkan Pendayagunaan media informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah
7. Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat
8. Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi

1.6.2 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencapai Tujuan RPJMD 2025 – 2029 dan Sasaran Renstra Renstra 2025 – 2029

Dengan Bergantinya Kepala Daerah dan Perubahan RPJMD untuk periode 2025-2029 maka perubahannya strategi pencapaian tujuan RPJMD 2025 – 2029 dan Sasaran Renstra Renstra 2025 – 2029

Untuk Medukung Pencapaian Visi, Misi pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yaitu :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya

Misi : 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi

Maka Disusunlah Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagai berikut :

1. Optimalisasi Infrastruktur Digital Pemerintah Daerah
2. Optimalkan Aplikasi Pelayanan Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
3. Meningkatkan Kualitas Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan
6. Mengoptimalkan Pendayagunaan media informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah
7. Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat
8. Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektorial yang Terintegrasi

Dari hasil Penelaahan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna maka dapat disimpulkan perbandingan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2025 diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur TIK, pengembangan dan integrasi sistem informasi daerah, peningkatan kualitas data statistik sektoral, serta penerapan standar keamanan informasi yang lebih baik.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi langkah penting agar program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sedangkan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 diarahkan Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta penerapan standar keamanan informasi yang baik serta peningkatan kualitas Data statistik.

I.7 PERMASALAHAN STRATEGIS DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perbandingan permasalahan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk memastikan keselarasan pencapaian tujuan RPJMD dan sasaran Renstra antarperiode 2021–2025 dan 2025–2029 sebagai berikut :

1.7.1 Permasalahan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencapai Tujuan RPJMD 2021 – 2025 dan Sasaran Renstra Renstra 2021 – 2025

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Belum Optimal
2. Keterbukaan informasi publik belum optimal
3. Publikasi data statistik sektoral belum optimal
4. Tingkat keamanan informasi masih belum optimal

1.7.2 Permasalahan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencapai Tujuan RPJMD 2025 – 2029 dan Sasaran Renstra Renstra 2025 – 2029

1. Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) belum optimal
2. Keterbukaan informasi publik belum optimal
3. Publikasi data statistik sektoral belum optimal
4. Tingkat keamanan informasi masih belum optimal

Berdasarkan hasil perbandingan, permasalahan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode RPJMD dan Renstra 2021–2025 pada prinsipnya masih berlanjut pada periode RPJMD dan Renstra 2025–2029. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi bersifat berkelanjutan dan belum sepenuhnya terselesaikan. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada periode sebelumnya belum optimal, pada periode 2025–2029 masih menjadi fokus utama dalam bentuk peningkatan kualitas dan integrasi layanan digital pemerintahan. Selain itu, keterbukaan informasi publik serta publikasi data statistik sektoral yang belum optimal pada periode 2021–2025 tetap menjadi tantangan strategis pada periode selanjutnya, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan ketersediaan data yang akurat. Demikian pula, tingkat keamanan informasi yang belum optimal pada periode sebelumnya masih memerlukan penguatan pada periode 2025–2029 untuk menjamin keandalan sistem dan perlindungan data pemerintahan

I.5 Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan
- 2 Pengukuran Kinerja Awal dan Perubahan
- 3 Tabel Capaian Akhir Kinerja Renstra

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Menghadapi tantangan yang berkelanjutan serta peningkatan dan kualitas publikasi dan informasi dalam peningkatan jaringan, kualitas terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik sebagai bagian integral dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi faktor kunci yang memerlukan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Strategis, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan berbasis digital. Perencanaan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan informasi yang aman, berkualitas, andal, dan mudah diakses, sekaligus mendukung pengembangan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan berkeamanan tinggi, serta pengelolaan data statistik yang terpusat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah menyusun dan merencanakan pelaksanaan tugas serta fungsi dengan berpedoman pada pelaporan kinerja dan hasil kerja yang terarah sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2021 -2026
3. IKK (Indikator Kinerja Kunci)
4. IKU (indicator Kinerja Utama) dan IKI (indicator Kinerja Individu)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

II.1 RPJMD Kabupaten Natuna

RPJMD berperan sebagai dokumen perencanaan utama yang menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu menengah, yaitu lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD disusun oleh pemerintah daerah setelah pelantikan kepala daerah dan berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan selama masa kepemimpinannya. Selanjutnya adanya penetapan indikator daerah dengan bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir masa jabatan yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Berikut penjabaran untuk RPJMD Kabupaten Natuna periode 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Natuna Periode 2026 - 2030 adalah :

Tabel II.1 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna (RPJMD Tahun 2021 – 2026)

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
6.	Menciptakan Reformasi Birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy)	6.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	6.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indek Reformasi Birokrasi
7.	Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.1	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital Bagi semua sektor	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	7.1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan

Tabel II.2 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna (RPJMD Tahun 2026 – 2030)

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	4.1	Mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi berbasis teknologi	Indeks Reformasi Birokras (Nilai)	4.1.1	meningkatnya kualitas layanan publik dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik
							Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
					4.1.2	meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Perbandingan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada periode RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2026–2030 memperlihatkan keberlanjutan arah pembangunan yang disertai dengan penajaman fokus pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada RPJMD 2021–2026, prioritas pembangunan dititikberatkan pada penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan keterbukaan informasi publik sebagai dasar terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, pada RPJMD 2026–2030, kebijakan tersebut diarahkan secara lebih strategis melalui optimalisasi reformasi birokrasi berbasis teknologi yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik, penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Penajaman indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi hasil pada periode ini selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menjadi landasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

II.2 RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam jangka waktu tertentu, Renstra OPD disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan

misi kepala daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Berdasarkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Natuna yang tertuang didalam RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2026–2030 dan kaitannya dengan Renstra 2021–2026 dan Renstra 2026–2030 dapat di lihat pada table berikut :

Tabel II.3 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis
(RENSTRA Tahun 2021 – 2026)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks SPBE	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP
3.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

4.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan statistik sektoral pemerintah daerah	Persentase release data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu	Meningkatnya ketersediaan Data Statistik sektoral yang berkualitas	Persentase Ketersediaan data Statistik Sektoral yang terupdate

Tabel II.4 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2026 – 2030)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi digital	Indeks SPBE	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah

		Nilai SAKIP	Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik
		Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
			Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2026–2030 menunjukkan kesinambungan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Pada periode 2021–2026, fokus diarahkan pada penguatan dasar sistem pemerintahan berbasis elektronik, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan pengelolaan data statistik. Selanjutnya, Renstra 2026–2030 memperkuat kebijakan tersebut melalui pengembangan layanan digital yang lebih berkualitas dan aman, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta pemanfaatan data yang terintegrasi. Dengan demikian,

Renstra 2026–2030 menjadi kelanjutan yang menekankan peningkatan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan digital yang lebih efektif.

Penerapan indikator kinerja dalam penyusunan LKJIP bertujuan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan, baik pada level hasil (outcome) maupun dampak (impact). Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dirumuskan berdasarkan hasil analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan, indikator kinerja disusun sebagai ukuran yang merepresentasikan kontribusi program terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator-indikator tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika serta terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan tiga urusan utama, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik, yang masing-masing memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terintegrasi dan akuntabel.

Setelah tersusunnya pelaksanaan penentuan tujuan, sasaran dan indikatornya dilaksanakan diteruskan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan pelaksanaan program dan kegiatan serta subkegiatan yang menjadi prioritas yang akan dilaksanakan pada periode tahunan adapun perencanaan dan hasil penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Daftar program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Disesuaikan DPA Murni Dan DPA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja RENJA 2025 (DPA Murni)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja RENJA Perubahan 2025 (DPA Perubahan)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3) Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

			4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat - Pelayanan Informasi Publik - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik - Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Penyusunan Konten		1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat - Pelayanan Informasi Publik - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik - Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik - Penyusunan Konten
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pememerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa		1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pememerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

	2) Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Koordinasi Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah - Penyelenggaraan Jaring Intra Pemerintah Daerah		2) Pengelolaan e-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi - Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah - Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE - Koordinasi Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Nasional - Peningkatan Kualitas Data Sataistik Sektoral

			- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik		1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyesuaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025 dari DPA Murni ke DPA Perubahan menunjukkan upaya penguatan efisiensi penganggaran. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui penetapan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis, berdampak langsung pada peningkatan kinerja perangkat daerah, serta mendukung keberlanjutan layanan pemerintahan dan pelayanan publik. Perubahan difokuskan pada optimalisasi administrasi pemerintahan yang didukung kelancaran jaringan internet guna mendukung pelaksanaan digitalisasi pemerintah daerah, penguatan komunikasi publik, serta peningkatan kualitas statistik sektoral, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih terarah, efektif, dan akuntabel tanpa mengurangi capaian tujuan pembangunan daerah.

II.3 IKK (Indikator Kinerja Kunci)

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan salah satu alat ukur manajemen untuk memastikan bahwa tujuan strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, untuk menilai keberhasilan atau pencapaian tujuan strategis suatu organisasi, program, atau kegiatan. IKK dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara terukur, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi serta efektivitas suatu organisasi adalah :

Tabel II.6 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (RENSTRA Tahun 2021 – 2026)

No	Bidang Urusan/Indikator
2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika	
1	Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo
2	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate
3	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
6	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar
8	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo
9	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan
10	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
11	Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
12	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government
13	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah
2.14 Urusan Statistik	
1	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS
2	Tersedianya Buku Profil Daerah

Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dilakukan dengan berangkat dari identifikasi permasalahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian disusun dan dikelompokkan secara sistematis agar data dan informasi yang

dibutuhkan dapat dianalisis dengan jelas. Proses ini menjadi dasar dalam menilai dan mengevaluasi capaian kinerja secara terukur. Hasilnya terlihat pada kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menunjukkan peningkatan kompetensi ASN pengelola TIK, tersedianya data statistik sektoral yang lebih mutakhir, serta semakin kuatnya peran komunitas dan mitra strategis dalam penyebaran informasi pemerintah. Selain itu, meningkatnya layanan publik berbasis daring dan terintegrasi, kualitas serta jangkauan akses internet perangkat daerah, pemenuhan standar portal OPD, penerapan aplikasi sesuai ketentuan, pengamanan jaringan, dan dukungan regulasi e-government menunjukkan penguatan SPBE yang berdampak pada efisiensi kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II.4 IKU (Indikator Kinerja Utama)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dan disusun berdasarkan hasil perumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta dokumen perencanaan strategis (Renstra), yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis organisasi.

IKU menjadi alat ukur utama kinerja organisasi secara menyeluruh dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan searah dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan kinerja tahunan, IKU digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga setiap instansi pemerintah wajib merencanakan kegiatan yang selaras dengan indikator keberhasilan tersebut dan mengusulkan pendanaannya melalui dokumen RKA K/L atau RKA SKPD agar anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Selanjutnya,

setelah dokumen perencanaan ditetapkan, pemerintah daerah mendistribusikan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan kepada masing-masing OPD melalui penyusunan Perjanjian Kinerja, yang disusun berdasarkan Renstra dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas masing-masing, sekaligus mencerminkan komitmen Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi landasan evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai tingkat kinerja pada periode tertentu seiring dengan terjadinya pergantian kepala daerah dari periode 2021–2026 ke periode 2025–2030, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah menyusun dan merencanakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2026)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase peningkatan teknologi informasi dan komunikasi	$\frac{\text{Realisasi peningkatan TIK}}{\text{Target peningkatan TIK}} \times 100\%$ <u>Peningkatan TIK:</u> 1. Aset TIK 2. Akses internet titik layanan publik 3. Desa tercoverage layanan 4G 4. PD terkoneksi jaringan intra pemda 5. Aplikasi umum yang diimplementasikan oleh PD 6. Website perangkat daerah (termasuk desa)	Bidang Penyelenggaraan e-Government
2.	Meningkatnya publikasi informasi dan komunikasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	$\frac{\text{Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media}}{\text{Target informasi}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate	$\frac{\text{Data statistik sektoral yang terupdate}}{\text{Target data statistik sektoral}} \times 100\%$	Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tabel II.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2030

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	DESKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1		2	3	4	5	6
4.1	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kemudahan akses dan kualitas informasi publik di tingkat daerah. Akses dan kualitas informasi publik dipandang sebagai aspek penting dalam mewujudkan keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang akuntabel melalui pemanfaatan akses internet dan transformasi digital.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik menggambarkan sejauh mana masyarakat menilai kemudahan akses dan kualitas informasi publik yang disediakan pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan, keakuratan, dan kemanfaatan informasi yang disampaikan melalui berbagai media, termasuk website resmi, media sosial, dan layanan digital lainnya.	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survey yang dilakukan secara berkala
4.2	Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan, kemampuan dan kinerja suatu instansi pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan statistik secara terpadu dan berkualitas	Ukuran Kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan dan kemampuan suatu instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan statistik secara terencana terkoordinasi dan berstandar sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	DESKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1		2	3	4	5	6
4.3	Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi di organisasi Pemerintahan	Ukuran Kuantitatif yang menilai tingkat kesiapan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan, mengelola, dan memelihara sistem keamanan informasi secara menyeluruh	Indeks KAMI	Laporan Online Assessment Indeks KAMI

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna meningkatkan dalam hal kualitas pencapaian kinerja dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat dari hasil publikasi dan pelaksanaan kualitas dan kelancaran jaringan dalam mendukung Digitalisasi Sitem Pemerintahan Daerah sesuai perundang undangan dan peraturan yang berlaku dimana pada Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021–2026 difokuskan pada capaian output dan kuantitas layanan, seperti peningkatan aset TIK, perluasan akses internet di titik layanan publik dan desa, keterhubungan perangkat daerah melalui jaringan intra pemerintah, implementasi aplikasi umum, serta ketersediaan website perangkat daerah. Selain itu, kinerja juga diukur melalui cakupan publikasi informasi pemerintah pada berbagai media dan persentase ketersediaan data statistik sektoral yang terbaru. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemenuhan infrastruktur, ketersediaan layanan, dan ketercukupan data sebagai dasar penguatan tata kelola teknologi informasi, komunikasi publik, dan statistik sektoral.

Sedangkan IKU Tahun 2025–2030, fokus pengukuran kinerja mengalami penguatan dan pergeseran ke arah kualitas, dampak, dan keberlanjutan layanan digital. Pengelolaan TIK tidak hanya diukur dari ketersediaan sarana dan sistem, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik yang disediakan pemerintah daerah. Pada aspek statistik sektoral, pengukuran kinerja ditingkatkan melalui Indeks Pembangunan Statistik yang menilai kematangan tata kelola statistik secara terpadu sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Selain itu, dimensi kinerja diperluas dengan memasukkan aspek keamanan informasi melalui pengukuran tingkat kesiapan keamanan informasi pemerintah daerah menggunakan Indeks KAMI, sebagai bentuk penguatan perlindungan sistem elektronik dan data digital.

II.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen antara pimpinan perangkat daerah dan kepala daerah yang memuat penugasan, sasaran, indikator, serta target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta RKPD Tahun 2025, dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, target capaian, serta dukungan program dan kegiatan yang didanai melalui APBD, yang dirumuskan secara terukur sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja perangkat daerah.

1. Masukan Anggaran awal dan perubahan
2. Target Program, Kegiatan dan SubKegiatan (samakan)

NO.	TUJUAN/SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)/S UBKEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
						MURNI	PERUBAHAN
1	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Indeks SPBE	INDEKS	3,10		
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PERSENTASE	74,40		
1.1.A		Urusan Bidang Persandian					
1.1.A.1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE	50		
1.1.A.1.1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	OPD	27		
1.1.A.1.1.1		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring, Komunikasi sandi pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Kebijakan	1		

1.1.A.1.1.2		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Laporan	1		
1.1.B		Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika					
1.1.B.1		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE	23		
1.1.B.1.1		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web	Persentase	60		
1.1.B.1.1.1		Pengelolaan nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	2		
1.1.B.1.2		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	Persentase	66		

1.1.B.1.2.1		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1		
1.1.B.1.2.2		Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	0		
1.1.B.1.2.3		Koordinasi Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	10		
1.1.B.1.2.4		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	1		
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola	Persentase	62		

	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Informasi dan Komunikasi				
2.1	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik		Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	Persentase	85		
2.1.B		Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika					
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE	78,51		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Orang	44881		
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	60		
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang	Permohonan	1		

			dislesaikan sesuai Perundang-undangan				
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	400		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	0		
		Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dokumen	0		
		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	3		
3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah		Persentase release data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu	Persentase	70		
3.1	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas		Persentase Ketersediaan data statistic sektoral yang terupdate	Persentase	70		
2.1.C		Urusan Bidang Statistik					
3.1.C.1		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE OPD YANG MENYEDIAKAN DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE	82		

3.1.C.1.1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD	Data	275		
3.1.C.1.1.1		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	2		
3.1.C.1.1.2		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Standar	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	2		
3.1.C.1.1.3		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang Sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	2		
4	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP	Nilai	81,40		
4.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai LAKIP	Nilai	81,40		
4.1.E		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	81.35	0	0
4.1.E.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	63,50	0	0
4.1.E.1.1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	0	0

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
5	Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,4		
5.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49		
5.1.F		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	PERSENTASE	85		
5.1.F.1		Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu	1	3.660.813.500	
5.1.F.1.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	26	3.660.813.500	
5.1.F.2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	Persentase	78		
5.1.F.2.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5		
5.1.F.2.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2		

5.1.F.2.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	58000		
5.1.F.2.4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60		
5.1.F.3		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase	40		
5.1.F.3.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Paket	50		
5.1.F.3.2		Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	5		
5.1.F.4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Saran Penunjang Urusan Perkantoran	Persentase	83		
5.1.F.4.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000		
5.1.F.4.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	2		
5.1.F.4.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	26		

5.1.F.5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	Persentase	68		
5.1.F.5.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	2		
5.1.F.5.2		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	2		
5.1.F.5.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penerapan akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui proses pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas kinerja memiliki keterkaitan yang erat dengan proses perencanaan pembangunan, khususnya melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi. IKU yang dirumuskan secara jelas dan terukur dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, menjadi dasar dalam menilai kinerja secara objektif. Keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengukuran dan pelaporan kinerja mendorong penggunaan sumber daya, termasuk anggaran, secara efektif dan efisien serta berorientasi pada pencapaian hasil.

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu periode pelaksanaan. Capaian ini diukur berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Utama dan indikator pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

III.1.1 Capaian Kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna per Indikator RPJMD Tahun 2021 - 2026

Dengan Berpedoman Kepada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Perencanaan dan Penyusuna Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna serta berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga lebih terukur dan relevan dapat dipantau, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara objektif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Yang mana Sebelum merencanakan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan telaahan atas visi dan misi serta sasaran,tujuan dan sasaran yang tertuang didalam RPJMD 2021-2026 dimana keterkaitan antara visi dan misi, tujuan sasaran program dan indicator program dinas komunikasi dan informatika kabupaten natuna adalah sebagai berikut

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai dan Kultur

Misi : 6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang cerdas (SMART BUREAUCRACY)

7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dengan Memfokuskan Pada 3 Urusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tiga urusan utama, yaitu bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Pelaksanaan urusan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dan perencanaan kinerja perangkat daerah.

Penyusunan rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, serta indikator sasaran yang ditetapkan merupakan hasil dari penelaahan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

Penyesuaian misi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika menyebabkan fokus perencanaan dan pelaksanaan kinerja diarahkan pada pencapaian Misi ke-6 dan Misi ke-7. Kedua misi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga menjadi landasan utama dalam menentukan tindak lanjut program, kegiatan, serta capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dihasilkan.

Tabel III.3 : Keterkaitan Antara Misi Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran yang tertuang Dalam Dokumen RPJMD

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
6	Menciptakan Reformasi Birokrasi yang cerdas (SMART BUREAUCRACY)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
7	Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi semua Sektor	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan

Dengan memahami tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki dasar yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pemahaman tersebut memungkinkan perangkat daerah untuk menetapkan indikator kinerja yang relevan guna mendukung pencapaian tujuan Kabupaten Natuna, khususnya dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan publik serta terwujudnya reformasi birokrasi yang cerdas (Smart Bureaucracy), sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026, Sebagai upaya untuk memfokuskan pencapaian tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran melalui indikator kinerja yang telah dirinci pada Tabel III.3. Berdasarkan indikator tersebut, selanjutnya disusun perumusan sasaran dan strategi pelaksanaan yang akan di susun menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.4 : Misi Tujuan dan Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
6	Menciptakan Reformasi Birokrasi yang cerdas (SMART BUREAUCRACY)	1 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	1 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP
		2 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Indek Pelayanan Publik	2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
7	Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE	3 Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		4 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi dan Komunikasi	4 Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai Media
		5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Statistik sektoral pemerintah daerah	Persentase realisasi data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu	5 Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan data Statistik Sektoral

Dengan adanya keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki dasar yang jelas dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi instrumen strategis dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan

yang terarah, terukur, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, penetapan IKU bukan hanya sebagai indikator administratif, melainkan sebagai tolok ukur utama dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel III.4 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2016- 2021 Sebelum Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan e-government	1.1	Jumlah Jaringan Komunikasi (Jaringan)
		1.2	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
2	Meningkatnya Ketersediaan Media Informasi Pemda	2.1	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (Jenis)
		2.2	Website Milik Pemerintah Daerah (Website)
		2.3	Pameran/Expo
3	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3.1	Predikat/Nilai Akuntabilitas

Tabel III.5 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2016- 2021 Setelah Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
1.	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan e-Government	1.1	Persentase OPD yang Menyelenggarakan E-Government
2	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	2.1	Persentase Berita/informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan
		2.2	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
		2.3	Jenis Media Sarana Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3	Meningkatnya Pengelolaan data statistik Daerah	3.1	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan
4	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	4.1	Predikat/Nilai Akuntabilitas

Berdasarkan Tabel III.4 dan Tabel III.5, terdapat perubahan mendasar pada rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna periode 2016–2021. Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dengan sistem pengukuran kinerja yang lebih terukur dan berbasis persentase. Sebelum perubahan, indikator masih berorientasi pada jumlah atau jenis sarana prasarana, seperti jumlah jaringan komunikasi, sistem informasi perizinan, surat kabar, website, dan kegiatan pameran, sehingga lebih menekankan pada aspek ketersediaan (output).

Setelah perubahan, indikator disempurnakan menjadi lebih strategis dan berorientasi pada capaian (outcome), seperti persentase OPD yang menerapkan e-government, persentase publikasi informasi pemerintah daerah, cakupan pemberdayaan KIM, serta persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan. Selain itu, ditambahkan sasaran khusus terkait pengelolaan data statistik daerah, sementara indikator akuntabilitas tetap dipertahankan dalam kerangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Perubahan ini menunjukkan pergeseran fokus dari penyediaan infrastruktur menuju optimalisasi pemanfaatan teknologi, penguatan diseminasi informasi publik, dan tata kelola data yang akuntabel.

Hal ini merupakan gambaran awal pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Data yang diperoleh sebelum periode 2021–2026 mengalami kendala akibat terjadinya musibah kebakaran di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mengakibatkan sebagian data serta dokumen pendukung pengukuran kinerja tidak dapat terdokumentasi dan direalisasikan secara optimal sesuai kondisi yang sebenarnya.

Seiring dengan terpilihnya Kepala Daerah periode 2021–2026, telah dilakukan penyusunan kembali Rencana Strategis (Renstra)

berdasarkan hasil penyelarasan dengan RPJMD Kabupaten Natuna periode 2021–2026. Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan dan target pembangunan daerah yang baru, maka dilakukan pula peninjauan dan penyusunan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) agar selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah.

Berikut Indikator Kinerja Utama Yang telah tersusun berdasarkan Dokumen Perencanaan periode 2021-2026 :

Tabel III.5 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021- 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					FORMULASI
				2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	55,27	60,09	65,21	70,36	74,40	$\frac{\text{Realisasi Peningkatan TIK}}{\text{Target Peningkatan TIK}} \times 100\%$ Peningkatan TIK : 1. Aset TIK 2. Akses Internet titik layanan publik 3. Desa tercoverage Layanan 4G 4. PD Terkoneksi Jaringan Intra Pemda 5. Aplikasi Umum yang diimplementasikan oleh PD 6. website Perangkat Daerah (termasuk Desa)	
2	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui Berbagai Media	Persen	70	73	75	80	85	$\frac{\text{Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui Berbagai Media}}{\text{Target Informasi}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Dta Statistik yang Terupdate	Persen	53	55	60	65	70	$\frac{\text{Data Statistik Sektoral yang Terupdate}}{\text{Target Data Statistik Sektoral}} \times 100\%$	

Tabel III.5 : Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang sesuai Indikator Kinerja Utama Tahun 2021- 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Pemerintah Desa
				Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				1. Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah
				2. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui Berbagai Media	Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui Berbagai Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				1. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				2. Pelayanan Informasi Publik
				3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
				4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				5. Penyusunan Konten
3	Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Data Statistik yang Terupdate		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral DiLingkup Daerah Kabupaten/Kota
				1. Meningkatkan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

Dalam Perencanaan dan pelaksanaan Kinerja serta capaian Kinerja Organisasi (OPD) merupakan satu kesatuan yang harus saling terkait sehingga dalam pencapaian tujuan dan sasaran kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna harus mampu menggambarkan kinerja dalam pencapaian organisasi dalam pencapaian Kabupaten dimana sesuai penjabaran diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dimana Indikator Kinerja Utama merupakan tingkatan pencapaian untuk pengukuran yang realistis dan terukur untuk pencapaian organisasi beserta program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna secara ringkas maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Hasil evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan periode 2021–2026 telah dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Evaluasi ini menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian kinerja dalam mendukung penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika. Hasil pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan serta perumusan perencanaan strategis yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026.

Tabel III.4 : Hasil Evaluasi Capaian Indikator Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Periode 2021-2025

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	60,09	65,21	70,36	75,25	83,21	77,33	76	100
Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui berbagai Media	Persen	73	75	80	90	159	98	100	100
Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	Persen	55	60	65	85	85,11	78,43	100,36	111,76

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melaksanakan pemantauan kegiatan fisik dan keuangan yang mencakup pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program, kinerja sumber daya manusia, serta realisasi fisik kegiatan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya target Dinas dan target yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor komunikasi dan informatika. Tingkat capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan perangkat daerah dalam merealisasikan target jangka menengah serta sebagai tolok ukur pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari Rencana Strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta menjamin ketersediaan informasi yang aman, berkualitas, stabil, dan mudah diakses. Dalam implementasinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui menu penatausahaan, perencanaan, dan renstra

guna memastikan integrasi data dan keselarasan pelaksanaan program dengan Pemerintah Pusat berikut rencana aksi pelaksanaan program dengan pengelompokan berdasarkan per Urusan Bidang khususnya Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian

Tabel 13 Rencana Aksi DisKominfo Natuna Tahun 2025

Prioritas Daerah	Sasaran	Urusan	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi
Percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai laporan LKJiP	Nilai	81,30	75,25
				Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai sop	Persen	85	100
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah	Persen	74,77	59,71
		Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Program aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persen	21	100
		Urusan pemerintahan bidang statistik	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase opd yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Persen	81	75

Dari tabel di atas adalah penjelasan dan hubungan antara fokus utama daerah dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada tahun 2025. Selanjutnya, informasi tersebut dapat diuraikan menjadi berbagai kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung efektivitas kerja dan pencapaian dalam penyelenggaraan di sektor komunikasi dan informatika yang terdiri dari 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan pada anggaran APBD Murni sedangkan pada APBD Perubahan menjadi 9

Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan bertambahnya 2 sub kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi fasilitas kerja yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya menjadi kebutuhan penting dalam mendukung peningkatan

pelaksanaan tugas dan kinerja serta Dalam upaya mencapai Prioritas Daerah yang ditekankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna, yaitu :

- a. Percepatan Reformasi Birokrasi;
- b. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari setiap prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merinci tujuan, sasaran, dan indikator dalam Rencana Strategis. Prioritas pertama memiliki tujuan yang terkait erat dengan prioritas kedua yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Kedua sasaran prioritas tersebut akan disusun IKK (Indikator Kinerja Kunci) dari IKK ini maka dipilih dan disusun kesesuaian yang akan dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan memperhatikan kedua prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menyusun lima tujuan utama dengan indikator tujuan dalam Rencana Strategis. Terdapat juga sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai tujuan strategis tersebut yang dijabarkan sebagai berikut :

Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adapun program dan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Adalah :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program		Indikator Program
1	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika
			2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang Menyediakan data dan Metadata Statistik Sektoral
2	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui Berbagai Media	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerin daerah
3	Meningkatnya Ketersediaan data statistic sektoral yang berkualitas	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menyediakan data dan Metadata Statistik Sektoral

1. **Sasaran Strategis IKU 1 “Meningkatnya pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi”**

Dengan indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama yaitu: **Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

Untuk pencapaian Kinerja pada IKU 1 ini Dinas Komunikasi dan Informatika dihitung dari Peningkatan TIK yang terdiri dari:

- Aset TIK;
- Akses Internet Titik Layanan Publik;
- Desa Tercover Layanan 4G;
- PD (Perangkat Daerah) terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- Aplikasi Umum yang diimplementasikan Oleh Perangkat Daerah;
- Website Perangkat Daerah (Termasuk Desa).

Tabel 21
Indikator Kinerja Utama 1 & Formulasi Perhitungannya
Dalam Pencapaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	$\frac{\text{Realisasi Peningkatan TIK}}{\text{Target Peningkatan TIK}} \times 100\%$	Peningkatan TIK 1.Aset TIK 2.Akses Internet Titik Layanan Publik 3.Deserta tercoverage Layanan 4G 4.PD Terkoneksi Jaringan Intra Pemda 5.Aplikasi Umum yang diimpementasikan oleh PD 6.Website Perangkat Daerah (Termasuk Desa)

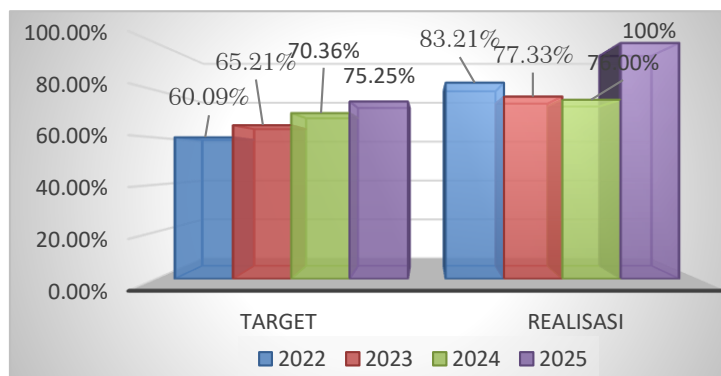
Dalam Pencapaian Perioritas Daerah yang akan dicapai Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yaitu :

Tabel 22
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran IKU 1 Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Awal	TARGET (2024)	REALISASI	Capaian 2024(%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	55,27	70,36	76,00	108,02

Program dan kegiatan tahun anggaran 2024 yang mendukung secara langsung pencapaian Indikator IKU 1 : Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari 1 (Satu) Program, 2 (Dua) kegiatan dan 5 (Empat) Sub Kegiatan serta 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dalam hal persandian untuk pengamanan informasi sebagai pendukung pelaksanaan peningkatan teknologi dan informasi dikabupaten natuna

Grafik 5
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Tahun 2022 s/d 2025



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk pengembangan aplikasi berbasis online dan desktop. Dinas ini juga terus berupaya menyediakan akses internet yang memadai, meskipun masih ada beberapa titik yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Komitmen ini mendukung implementasi e-government di OPD, kecamatan, desa, serta fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Diharapkan, akses internet yang optimal dapat mempercepat penyebaran informasi, berita, dan literasi bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama, Dinas Komunikasi juga telah menetapkan enam target penting untuk meningkatkan teknologi dan informasi di wilayahnya.

a. Aset TIK

Infrastruktur TIK Pemerintah Kabupaten Natuna mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas pendukung untuk mendukung sistem, aplikasi, komunikasi, serta pengolahan dan penyimpanan data. Infrastruktur ini juga meliputi perangkat integrasi dan elektronik lain yang mendukung operasional pemerintahan.

Tabel 23 Rekap Aset Tetap TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna

No	Nama Barang TIK	Tahun			Jumlah Barang
		2022	2023	2024	
1	Camera + Attachment				1
2	Video Conference		6		8
3	Camera Film		2		2

4	Mainframe (Komputer Jaringan)				1
5	A.C. Split		16		16
6	Internet				6
7	Lemari Kayu		3		3
8	Tripod Camera		3		3
9	Local Area Network (LAN)				2
10	Internet				6
11	PC Unit		4		1
12	Laptop		2		18
13	Notebook		1		7
14	Printer	1	1		13
15	Peralatan Jaringan				2
16	Filling Cabinet Besi			3	3
17	LCD Projector/Infocus			1	1
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector			1	1
19	Meja Kerja Kayu			41	41
20	Kursi Putar			41	41
21	Sound System			1	1
22	Meja Kerja Pejabat Eselon II			2	2
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III			3	3
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV			5	5
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon II			1	1
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			3	3
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			5	5
28	Microphone/Wireless MIC			2	2
29	Mixer PVC			1	1
30	Layar Film/Projector			3	3
31	Kamera Udara			2	2
32	Loudspeaker			1	1
33	Kursi Tunggu			2	2
34	Meja Rapat			1	1
35	Kursi Rapat			20	20
36	UPS			29	29
37	Penghancur Kertas			3	3
38	Meja stasiun kerja ruang kontrol professional furnitur kantor tinggi Stan duduk dapat diatur ruang pusat control meja			1	1
39	Taff STUDIO CLight Stand Tripod Studio130cmwith Ekstension Arm-CD-50 Silver			4	4
40	GVM1200D-RGBHight BeamBi-Color&Hight Power50WLED Video Light			6	6
41	GODOXPAKETLIGHTING SETPOD CAST GODOX SK-400II			1	1
42	Hard Case Box Cable Audio			2	2
43	ZOOMH6HANDY RECORDER+WHINSHIELD			1	1
44	RodePSA1+prostudioarm			4	4

45	MICROPHONE CABLE superlux			4	4
46	AUDIOAMPLIFIER AUDER PRODIGITAL AMPLIFIER HARDCORE AD-450PD			1	1
47	Headphone Monitor Hardwell HPH007			4	4
48	Yamaha HS-8			2	2
49	MIXER PVC Mixer			1	1
50	TURNTABLE tascammixcast4			1	1
51	SEAGATE (Hardis)			8	8
52	Meja stasiun kerja ruang control professional			1	1
53	Taff STUDIO CLight Stand Tripod Studio130cmwith Ekstension Arm- CD-50 Silver			4	4
54	GVM1200D-RGBHight BeamBi- Color & Hight Power 50W LED Video Light			6	6
55	GODOX PAKET LIGHTING SETPOD CAST GODOX SK-400II			1	1
56	HardCaseBoxCableAudio			2	2
57	HOLLYLAND LARK MAX DUO (mikropon wireles)			2	2
58	Kingma NP-FW50 for A6000 A6400 A7 II Paket 2 Battery 1 Dual Charger			6	6
59	HT			25	25
60	PAKET SOUND SYSTEM OUTDOOR			1	1
61	kamera SONY A6700			4	4
62	LAMPU BLITZ KAMERA FLASH			2	2
63	LENSA KAMERA SONYFE24- 70MMF4			4	4
64	LENSA KAMERA SONYLENSATELEE 70-350MMGOSS			1	1
65	TAS KAMERA SLING BAG			3	3
66	MEMORI LEXAR KARTU MEMORI			6	6
67	LEMARI BESI METAL			2	2
68	HFI 16 Kontainer Box			4	4
69	Autocueqtv Starter Series 15" Teleprompter Package With Qstart Software Autocue/qtv (TELEPROMTER)			1	1
70	TV LCD SAMSUNG 27 INCH FUL HD			1	1
71	GEEKOM MINI PC A5 32GB/512 GB AMD			1	1
72	HATSET BASEUS BOWI D03			1	1
73	REAPITER MOBILE VIEWSONIC VA1655			1	1
74	HDMI SPLITER			1	1
75	GIMBAL STABILIZEL HP			1	1
76	EVERBRAIT R20 DRY BOX			1	1
77	HOLLYLAND PYRO H 4K HDMI WIRELEEL			2	2
78	AVMATRIK SWITCHER			1	1
79	YOLOLIV YOLOBOX PRO			1	1
80	HAGIBIS 4K HDMI VIDIO			1	1

81	APPLE iPhone 13- 4/128 GB			1	1
82	SAMSUNG Galaxy S24 8/256GB			1	1
83	Panasonic HC-X2000UHD 4K Professional Camcorder			3	3
84	Takara Tripod Hydro A16			6	6
85	Focusrite Scarlett 2i24 th Gen			1	1
86	HOLLYLAND SOLIDCOM C1-6S WIRELESS INTERCOM HEADSET SYSTEM FULL DUPLEX			1	1
87	Server			1	1
88	Tenda			1	1
89	Mesin Pompa Air			2	2
90	Toolkit			2	2
91	Lemari Besi			2	2
92	Kontainer			4	4
93	Lampu Senter			2	2
TOTAL					413

*Sumber : KIB B Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025

b. Akses Internet Titik Layanan Publik

Penyediaan akses internet adalah program untuk menyediakan layanan internet kepada masyarakat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai latihan kerja, dan pos lintas batas negara. Melalui penyediaan akses internet ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital dan memperluas akses informasi, serta meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melibatkan mereka secara lebih aktif dalam dunia digital.

Tabel 24 Rekapitulasi Data Akses Internet Titik Layanan Publik (Puskesmas, Sekolah dan Ruang Publik/Perkantoran)

NO	NAMA LOKASI	Titik Akses
1	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	74
2	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	19
3	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	11
4	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	17
5	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	21
6	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	16
7	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI	16
8	KECAMATAN PULAU TIGA	14
9	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT	10
10	KECAMATAN MIDAI	10
11	KECAMATAN SUAK MIDAI	6
12	KECAMATAN SERASAN	14
13	KECAMATAN SERASAN TIMUR	11
14	KECAMATAN SUBI	10
15	KECAMATAN PULAU LAUT	12
16	KECAMATAN PULAU SELUAN	4
17	KECAMATAN PULAU PANJANG	3
JUMLAH		268

C. Desa Tercover Layanan 4G

Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas salah satu tugas utama yaitu menyediakan konektivitas internet untuk lembaga pemerintah dan masyarakat, harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ketersediaan internet, terutama di daerah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang belum terjangkau oleh jaringan fiber optik. Solusi yang dapat diaplikasikan meliputi penggunaan teknologi satelit dan internet wireless/radio link.

Sebagai contoh spesifik, Desa Tercover, yang telah terlayani oleh jaringan 4G, merupakan salah satu dari banyak area yang menikmati akses internet cepat. Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, telah berhasil mendokumentasikan sebanyak 153 menara BTS (Base Transceiver Station). BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan stasiun pemancar. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler dan sejenis gadget lainnya. Tower BTS bentuknya bisa bervariasi, ada yang kaki segi empat, kaki segitiga, bahkan ada yang hanya berupa pipa panjang saja atau menara operator seluler yang tersebar di seluruh kabupaten, rincian dari data ini tersaji dalam tabel Dibawah ini :

Tabel 25 Rekapitulasi Jumlah Menara OPSEL/BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	TOWER/ MENARA BTS / OPERATOR SELULER (OPSEL)						
	TSEL	Indosat	XL	Smartfren	POI	Repeater	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(12)
Midai	3	1	1	-	-	-	5
Bunguran Barat	7	2	5	1	-	1	16
Serasan	6	1	2	-	-	1	10
Bunguran Timur	20	2	7	13	1	1	44
Bunguran Utara	6	-	2	-	-	-	8
Subi	2	1	1	-	-	1	5
Pulau Laut	3	2	-	-	1	1	7
Pulau Tiga	6	-	1	-	-	1	8
Bunguran Timur Laut	5	1	5	1	-	-	12
Bunguran Tengah	4	-	3	2	-	-	9
Bunguran Selatan	3	-	1	2	-	-	6
Serasan Timur	2	-	2	-	-	-	4
Bunguran Batubi	3	-	2	1	-	-	6
Pulau Tiga Barat	2	2	1	-	-	-	5
Suak Midai	4	-	-	-	-	-	4

Pulau Seluan	1	-	1	-	-	-	2
Pulau Panjang	1	-	1	-	-	-	2
Tahun 2023	78	12	35	20	2	6	153
Tahun 2022	73	12	32	20	1	5	143

Tabel 26 Data Kualitas Layanan BTS/OPSEL Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Layanan				POI	Repeater	Non Aktif	Keterangan
	4G	3G	2G	G				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Midai	4	-	-	-	-	-	1	1. Indosat Reguler (di Sebelat OFF)
Bunguran Barat	12	-	-	-	-	1	2	1. Indosat Reguler OFF, 2. Repeater XL Reguler, 3. Tsel USO Bakti OFF,Propose Upgrate atau relokasi
Serasan	6	-	-	-	-	1	2	1. Indosat Reguler OFF & Repeater IPLH 2. TSEL USO Bakti OFF Propose relokasi
Bunguran Timur	40	-	-	-	1	1	-	1. Repeater XL USO BAKTI 2. POI XL USO BAKTI
Bunguran Utara	7	-	-	-	-	-	1	1. TSEI Reguler 2. TSEL USO Reguler (eks BAKTI OFF
Subi	2	-	-	-	-	1	1	1. Indosat Reguler OFF 2. Repeater IPLH
Pulau Laut	4	-	-	-	-	1	1	1. Indosat Reguler OFF
Pulau Tiga	6	-	-	-	-	1	-	1. Repeater IPH
Bunguran Timur Laut	11	-	-	-	-	-	1	1. Indosat Reguler OFF
Bunguran Tengah	8	-	-	-	-	-	1	1. TSEI USO Bakti OFF
Bunguran Selatan	6	-	-	-	-	-	-	
Serasan Timur	3	-	-	-	-	-	-	
Bunguran Batubi	6	-	-	-	-	-	-	
Pulau Tiga Barat	4	-	-	-	-	-	1	1. Indosat Reguler OFF
Suak Midai	4	-	-	-	-	-	-	
Pulau Seluan	2	-	-	-	-	-	-	
Pulau Panjang	2	-	-	-	-	-	-	

Tahun 2023	127	0	0	0	1	6	11
Tahun 2022	125	0	0	0	1	5	7

BTS (Base Transceiver Station) adalah bagian yang paling krusial dan membatasi dalam sebuah sistem, sehingga sangat menentukan kapasitas dan kualitas sistem secara menyeluruh. Kapasitas dan kualitas sistem umumnya bergantung pada BTS, sehingga kekuatan utama operator terletak pada kapasitas mereka untuk menyediakan jumlah BTS yang cukup, termasuk penempatan yang efisien dan sesuai dengan karakteristik area layanan.

Ditahun 2021 Terdapat peningkatan jumlah tower/BTS sebanyak 119 dengan bertambahnya sebanyak 25 Tower/BTS, diakhir tahun 2020 berjumlah 94 tower/BTS dan pada akhir 2022 Peningkatan jumlah tower menjadi 143 tower/BTS dengan rincian penambahan Telkomsel (Reguler) 9, XL (reguler) 2, Smartfren (reguler) 5, XL USO 12, Pada tahun 2021, terdapat peningkatan kualitas sinyal menjadi 4G 106 dari yang sebelumnya sebanyak 68 Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022 menjadi 125 layanan 4G dan tahun 2023 sebanyak 127 layanan 4G

Sedangkan untuk kualitas layanan BTS/OPSEL ada beberapa layanan yang nonaktif Tahun 2022 ini kabupaten Natuna yang sudah menerima program bantuan pembangunan tower/BTS dari Bakti Kemkominfo RI berjumlah 43 unit yang menyebar di 15 Kecamatan dan dilayani 4 operator seluler, Namun dari semua tower /BTS tersebut, 50% lebih masih menggunakan VSAT (satelit) yang dirasa kualitasnya masih sangat rendah dibanding dengan tower /BTS yang sudah menggunakan transmisi Radiolink maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melakukan permohonan Peningkatan Tower/BTS USO Bakti Kemkominfo RI melalui solusi teresterialisasi melalui existing tower terdekat.

Untuk tahun 2023 perubahan dan peningkatan layanan BTS/Opisel lebih meniti beratkan kepada pelayanan kekuatan sinyal 4G di beberapa daerah yang terasa kurang pada sinyal jaringan dimana ad beberapa operator seluler (OPSEL) melaksanakan relokasi dan upgrade dan mendata beberapa BTS/Opisel yang aktif dimana total Tower (BTS, Repeater & POI) masih dalam kondisi aktif adalah 134, antara lain : 74 Tower TSEL, 5 Tower Indosat, 35 Tower XL dan 20 Tower Smartfren

Berikut penjabarannya :

- Dari Tower BTS dengan Opisel TSEL ada 78 : **Aktif 74** & Tidak Aktif (OFF) 44 Tower BTS yang sudah tidak aktif (OFF) antara lain :

- 1 Tower BTS TSEL Reguler (eks USO BAKTI Kemkominfo RI) di Teluk Buton; dan
- 3 Tower BTS TSEL USO BAKTI Kemkominfo RI, sedang dalam propose upgrade dan atau relokasi, dikarenakan sudah ada Tower BTS Reguler di lokasi (Kelurahan/Desa) yang sama. Yaitu di Kelurahan/Desa : Selaut, Tanjung Setelung dan Air Lengit
- Dari Tower BTS dengan Opsel Indosat 12 : **Aktif 5**, Tidak Aktif (OFF) 77 Tower BTS yang sudah tidak aktif (OFF) adalah milik swasta (reguler), antara lain di Kelurahan/Desa :
 - Kel. Sedanau, Kec. Bung. Barat;
 - Desa Subi, Kec. Subi;
 - Desa Limau Manis, Kec. Bung. Timur Laut;
 - Desa Kadur, Kec. Pulau Laut;
 - Kel. Serasan, Kec. Serasan;
 - Desa Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat.
 - Desa Sebelat, Kec. Midai;
- Dari Tower BTS dengan Opsel **XL 35**, semuanya masih dalam kondisi aktif.
- Dari Tower BTS dengan Opsel **Smartfren 20**, semuanya masih dalam kondisi aktif.

Dengan Peningkatan dan pemanfaatan infrastruktur operator dengan baik dan melaksanakan pemantauan titik-titik yang terindikasi lemah dalam penerimaan sinyal diharapkan mewujudkan system pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE untuk kabupaten Natuna Semakin Baik.

Tabel 27 Desa dan Kelurahan yang dapat Mengakses Internet

Kecamatan (1)	Kel/Desa (2)	OPSEL				Layanan		POI (8)	Repeater (9)	Keterangan (10)
		TSEL (3)	Indosat (4)	XL (5)	Smartfren (6)	4G (7)				
Midai	Kelurahan Sabang barat	2	0	0	0	2		0	0	
	Sebelat	1	1	1	0	2		0	0	Indosat reg OFF
	Air putih	0	0	0	0	0		0	0	
Total		3	1	1	0	4		0	0	Indosat reg (di Sebelat "OFF"

Kecamatan n	Kel/Desa	OPSEL				Layanan	POI	Repeater	Keterangan
		TSEL	Indosat	XL	Smartfren	4G			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bunguran Barat	Kelurahan Sedanau	3	1	3	0	6	0	0	Indosat reg OFF
	Mekar Jaya	1	0	1	0	2	0	0	
	Binjai	1	1	1	1	3	0	1	Repeater regular
	Pian Tengah	1	0	0	0	1	0	0	
	Selaut	1	0	0	0	0	0	0	TSEL USO BAKTI OFF propose upgrade dan atau relokasi
Total		7	2	5	1	12	0	1	Indosat reg (di Kelurahan Sedanau) Tsel USO BAKTI (di Selaut) “OFF”
Serasan	Kelurahan Serasan	2	1	0	0	1	0	1	Indosat reg OFF & Repeater IPLH
	Kampung Hilir	0	0	0	0	0	0	0	
	Batu Berian	0	0	1	0	1	0	0	
	Tanjung Setelung	2	0	0	0	1	0	0	TSEL USO BAKTI OFF propose relokasi
	Tanjung Balau	1	0	0	0	1	0	0	
	Pangkalan	1	0	0	0	1	0	0	
	Jermalik	0	0	1	0	1	0	0	
Total		6	1	2	0	6	0	1	Indosat reg (di Kelurahan Serasan) & TSEL USO BAKTI (di Tanjung Setelung) “OFF”
Bunguran Batubi	Batubi Jaya	1	0	0	0	1	0	0	
	Gunung Putri	1	0	0	0	1	0	0	
	Sedarat Baru	0	0	1	1	2	0	0	
	Sedanau Timur	1	0	1	0	2	0	0	
	Semedang	0	0	0	0	0	0	0	
Total		3	0	2	1	6	0	0	
Bunguran Timur	Kelurahan Ranai Kota	6	1	3	4	13	0	1	Repeater USO BAKTI
	Kelurahan Ranai Darat	2	0	0	2	4	0	0	
	Kelurahan Bandarsyah	3	0	1	2	6	0	0	

Kecamatan n	Kel/Desa	OPSEL			Layanan		POI	Repeater	Keterangan
		TSEL	Indosat	XL	Smartfren	4G			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kelurahan Batu Hitam	3	0	0	2	5	0	0	
	Sungai Ulu	3	1	2	1	6	1	0	POI XL US BAKTI
	Sepempang	2	0	1	1	4	0	0	
	Batu Gajah	1	0	0	1	2	0	0	
Total		20	2	7	13	40	1	1	
Bunguran Utara	Kelarik Utara	1	0	0	0	1	0	0	
	Kelarik	1	0	1	0	2	0	0	
	Kelarik Air Mali	1	0	0	0	1	0	0	
	Teluk Buton	2	0	0	0	1	0	0	TSEL Reg (mengguna Tower TNI)
									TSEL USOC reguler (ek BAKTI) OFF
	Belakang Gunung Gunung Durian	0 1	0 0	1 0	0 0	1 1	0 0	0 0	
Total		6	0	2	0	7	0	0	TSEL Reg “Teluk Buton” (mengguna Tower TNI) TSEL USOC reguler (ek BAKTI) di Teluk Buton “OFF”
Subi	Subi	1	1	0	0	1	0	0	Indosat reg OFF
	Subi besar	0	0	0	0	0	0	0	
	Meliah	1	0	1	0	1	0	1	Repeater IPLH
	Terayak Subi Besar Timur	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	Meliah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	
Total		2	1	1	0	2	0	1	Indosat reg (di Subi) OFF & Repeater IPLH (di Subi Besar)
Pulau Laut	Tanjung Pala	1	1	0	0	2	0	0	
	Air Payang	1	0	0	0	1	0	0	
	Kadur	1	1	0	0	1	0	0	Indosat reg OFF

Kecamatan n	Kel/Desa	OPSEL			Layanan		POI	Repeater	Keterangan
		TSEL	Indosat	XL	Smartfren	4G			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total		3	2	0	0	4	0	0	Indosat reg (di Kadur) “OFF”
Pulau Tiga	Sabang Mawang	2	0	0	0	1	0	1	Repeater IPLH
	Sededap	1	0	0	0	1	0	0	
	Tanjung Batang	1	0	0	0	1	0	0	
	Serantas	1	0	0	0	1	0	0	
	Sabang Mawang Barat	1	0	0	0	1	0	0	
	Teluk Labuh	0	0	1	0	1	0	0	
Total		6	0	1	0	6	0	1	Repeater IPLH (di Sabang Mawang)
Bunguran Timur Laut	Tanjung	1	0	0	0	1	0	0	Indosat reg OFF
	Ceruk	1	0	1	1	3	0	0	
	Kelanga	1	0	1	0	2	0	0	
	Pengadah	1	0	1	0	2	0	0	
	Sebadai Hulu	1	0	0	0	1	0	0	
	Limau Manis	0	1	1	0	1	0	0	
	Selemam	0	0	1	0	1	0	0	
Total		5	1	5	1	11	0	0	Indosat reg (di Limau Manis) “O
Bunguran Tengah	Harapan Jaya	1	0	1	0	2	0	0	Tsel USO BAKTI OF
	Tapau	1	0	1	1	3	0	0	
	Air Lengit	2	0	1	1	3	0	0	
Total		4	0	3	2	8	0	0	Tsel USO BAKTI (di Lengit) “O
Bunguran Selatan	Cemaga	1	0	0	1	2	0	0	
	Cemaga Selatan	2	0	0	1	3	0	0	
	Cemaga Utara	0	0	1	0	1	0	0	
	Cemaga Tengah	0	0	0	0	0	0	0	
Total		3	0	1	2	6	0	0	
Serasan Timur	Arung Ayam	0	0	0	0	0	0	0	
	Air Nusa	0	0	1	0	1	0	0	
	Air Ringau	1	0	0	0	1	0	0	
	Payak	1	0	1	0	1	0	0	
Total		2	0	2	0	3	0	0	
Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	0	0	0	0	0	0	0	Indosat reg OFF
	Tg. Kumbik Utara	1	1	1	0	2	0	0	
	Setumuk	0	0	0	0	0	0	0	

Kecamatan n	Kel/Desa	OPSEL				Layanan	POI	Repeater	Keterangan
		TSEL	Indosat	XL	Smartfren	4G			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Selading	1	1	0	0	2	0	0	Indosat reg (di Tg. Kur Utara) “OP
Total		2	2	1	0	4	0	0	
Suak Midai	Air Kumpai	2	0	0	0	2	0	0	
	Batu Belanak	1	0	0	0	1	0	0	
	Gunung Jambat	1	0	0	0	1	0	0	
Total		4	0	0	0	4	0	0	
Pulau Seluan	Seluan Barat	1	0	0	0	1	0	0	
	Kelarik Barat	0	0	1	0	1	0	0	
Total		1	0	1	0	2	0	0	
Pulau Panjang	Pulau Panjang	1	0	0	0	1	0	0	
	Pulau Kerdau	0	0	1	0	1	0	0	
Total		1	0	1	0	2	0	0	
Total se Kecamatan 2023		78	12	35	20	128	1	5	
Total Se Kecamatan 2022		73	12	32	20	125	1	5	

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2024)

d. PD (Perangkat Daerah) terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Dalam Optimalisasi Pelaksanaan layanan kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan bentuk nyata dengan menghubungkan beberapa Gedung OPD, Kecamatan, kelurahan, puskesmas diwilayah kabupaten Natuna melalui jaringan intranet dan internet untuk peningkatan kinerja pelayanan publik.

Berikut ini adalah ringkasan perkembangan pembangunan infrastruktur e-Government di Kabupaten Natuna oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, telah berhasil dilakukan pemasangan infrastruktur e-Government di 19 OPD/Kantor dalam jaringan intra pemkab Natuna. Namun, pada tahun 2020, pembelanjaan infrastruktur tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, dengan bantuan Diskominfo Kabupaten Natuna, 3 OPD/Kantor berhasil melakukan penyambungan jaringan secara mandiri, dan ini berlanjut dengan penambahan 4 OPD/Kantor pada tahun berikutnya.

Sehingga, hingga diakhir tahun 2021, jumlah OPD/Kantor yang terhubung dalam jaringan intra Pemkab Natuna mencapai 27. Pada tahun 2022, upaya penyediaan akses internet terintegrasi pada jaringan infrastruktur e-Government berlanjut, menghasilkan 20 titik akses

baru, sehingga totalnya menjadi 47 OPD di lingkungan Pemkab Natuna yang telah terpasang.

Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat melalui kegiatan penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berhasil mencakup 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dua kecamatan baru, Seluan dan Pulau Panjang telah ditambahkan, meningkatkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 49 namun 1 Kecamatan saja yang baru terpasang jaringan intra pemerintah. Dari jumlah tersebut, 12 OPD masih mengandalkan jaringan V-SAT, sedangkan sisanya telah terkoneksi ke jaringan intranet menggunakan infrastruktur ISP dan infrastruktur pemerintah daerah.

Ini merupakan suatu proses yang harus terus dijalankan sebagai penunjang efisiensi kerja perkantoran, terutama dalam menyediakan layanan akses internet hingga akhir tahun 2023. Ke depannya, diharapkan akan ada kelanjutan dalam hal pemeliharaan, pembelanjaan untuk akses internet, peralatan jaringan, serta melanjutkan proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan intranet. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akses internet di kantor/OPD yang belum memiliki instalasi, termasuk untuk OPD yang berpindah kantor atau yang mengalami masalah dalam jaringan mereka.

Tabel. 28 DATA OPD YANG TERSEDIA LAYANAN AKSES INTERNET/MASUK DALAM JARINGAN INTRA PEMKAB NATUNA, SERTA OPD YANG MENGELOLA DOMAIN DAN SUB DOMAINTAHUN 2024

N O	NAMA OPD	KETERSEDIAAN AKSES INTERNET	DOMAIN/SUB DOMAIN
1.	INSPEKTORAT	Jaringan Intra dengan Infrast	https://inspektorat.natunakab.go.id/

		Pemkab Natuna	
2.	SEKRETARIAT DPRD	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://setwan.natunakab.go.id/
3.	SEKRETARIAT DAERAH	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://setda.natunakab.go.id/
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dpupr.natunakab.go.id/
5.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://dpmptsp.natunakab.go.id/

6.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dlh.natunakab.go.id/
7.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://dispورا.natunakab.go.id/
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://disdik.natunakab.go.id/
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	http://disdukcapil.natunakab.go.id/
10.	DINAS SOSIAL	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://dinsos.natunakab.go.id/
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://diskominfo.natunakab.go.id/
12.	DINAS PARIWISATA	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	http://disperindagkopum.natunakab.go.id/
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://dpad.natunakab.go.id/
15.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://disdamkar.natunakab.go.id/

16 .	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dkpp.natunakab.go.id/
17 .	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dpmd.natunakab.go.id/
18 .	DINAS PERHUBUNGAN	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://dishub.natunakab.go.id/
19 .	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://dp3ap2kb.natunakab.go.id/
20 .	DINAS PERIKANAN	Jaringan Intra dengan Infras ISP	http://diskan.natunakab.go.id/
21 .	DINAS KESEHATAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dinkes.natunakab.go.id/
22 .	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dprkpp.natunakab.go.id/
23 .	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Jaringan Intra dengan Infras ISP	http://disnakertrans.natunakab.go.id/
24 .	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://kesbangpol.natunakab.go.id/
25 .	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://bpkad.natunakab.go.id/

26 .	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://bpbd.natunakab.go.id/
27 .	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://bpp.natunakab.go.id/
28 .	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://www.bp3d.natunakab.go.id/
29 .	BADAN KEPEGAWAIAN	Jaringan Intra dengan Infras	https://bkpsdm.natunakab.go.id/

	DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pemkab Natuna	
30 .	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
31 .	KECAMATAN PULAU LAUT		https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
32 .	KECAMATAN MIDAI		https://kecmidai.natunakab.go.id/
33 .	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI		https://kecbatubi.natunakab.go.id/
34 .	KECAMATAN SERASAN TIMUR		http://kecserasantimur.natunakab.go.id/
35 .	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://kecbungtengah.natunakab.go.id/
36 .	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT		https://kecpulautigabarar.natunakab.go.i d/
37 .	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://kecbungbarat.natunakab.go.id/
38 .	KECAMATAN SUBI		https://kecsubi.natunakab.go.id/
39 .	KECAMATAN SELUAN		https://kecseluan.natunakab.go.id/
40 .	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://kecbungselatan.natunakab.go.id/
41 .	KECAMATAN SUAK MIDAI		https://kecsuakmidai.natunakab.go.id/
42 .	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://kecbungtimla.natunakab.go.id/
43 .	KECAMATAN SERASAN		https://kecserasan.natunakab.go.id/
44 .	KECAMATAN BUNGURAN UTARA		https://kecbungut.natunakab.go.id/
45 .	KECAMATAN PULAU TIGA		https://kecpulautiga.natunakab.go.id/
46 .	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://kecbungtim.natunakab.go.id/
47 .	KECAMATAN PULAU PANJANG		https://kecpulaupanjang.natunakab.go.id/

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2024)

e. Aplikasi Umum yang diimplementasikan Oleh Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika dimana disebutkan bahwa Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, pembangunan aplikasi umum ini tujuan agar masyarakat dan OPD serta penyelenggara pemerintahan lainnya di Kabupaten Natuna dapat memanfaatkan layanan pemerintah melalui Teknologi Informasi dan komunikasi.

Tabel 29 Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Aplikasi Umum Kabupaten Natuna

No	Jenis Aplikasi	Nama Aplikasi	OPD Pengguna	Kegunaan
1	Perencanaan	e-Planning	Semua OPD	Penyusunan Perencanaan Pembangunan
2	Penganggaran	iNFIS Anggaran	Semua OPD	Penyusunan Anggaran/RKA
3	Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Semua OPD	Pengadaan Barang dan Jasa
4	Kinerja	e-SAKIP	Semua OPD	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
5	Monitoring dan Evaluasi	e-MONEV	Semua OPD	Monitoring RKPD
6	Kearsipan	1. e-Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyimpanan Arsip
		2. Srikandi	Semua OPD	Penyimpanan Arsip
7	Kepegawaian	Sikekah	Semua OPD	Pencatatan Aktifitas/kinerja pegawai
8	Pengaduan	SP4N Lapor	Semua OPD dan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat
9	Data dan Informasi	Statistik	Semua OPD	Pengumpulan Data
10	Data dan Informasi	Sitante Eli	Semua OPD	Tandatangan elektronik
11	Data dan Informasi	Sipenting	Semua OPD	Sistem Elektronik Daerah Percepatan Penanganan Penurunan Stunting
12	Data dan Informasi	Sicantik	Semua OPD	sistem cloud untuk layanan

				perizinan non-berusaha dan non-perizinan
13	Perencanaan	SIPD Perencanaan	Semua OPD	Sistem Elektronik Perencanaan dan Keuangan
14	Keuangan	SIPD Penatausahaan	Semua OPD	Sistem Elektronik Perencanaan dan Keuangan

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2024)

f. Website Perangkat Daerah (termasuk desa)

Website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web (WWW) di Internet. Di era digital saat ini, internet merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan untuk memudahkan berbagai kegiatan.

Setiap orang dapat mengakses informasi terbaru dari manapun melalui website dengan menggunakan berbagai perangkat mulai smartphone, tablet, laptop hingga PC hanya dengan menggunakan koneksi internet. Website merupakan salah satu platform yang paling sering di akses untuk mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Terlebih saat ini sudah banyak aplikasi dan tutorial cara membuat website sendiri dari nol tanpa coding yang membuat proses pembuatan web semakin mudah dan pertumbuhan jumlah website selalu meningkat di Indonesia.

Penyebaran informasi yang cepat, dan efisien inilah yang menjadi alasan utama mengapa website akan selalu menjadi sarana penting untuk mendapatkan dan mengelola informasi.

Sejauh ini perkembangan digitalisasi di Kabupaten Natuna, cukup berkembang dengan pesat. Berikut ini data Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan yang menggunakan Website Pemerintah Daerah.

Tabel 30 Data Website Pemerintah Kabupaten Natuna

1	PEMKAB NATUNA	https://natunakab.go.id/
2	INSPEKTORAT	https://inspektorat.natunakab.go.id/
3	SEKRETARIAT DAERAH	https://setda.natunakab.go.id/
4	SEKRETARIAT DPRD	https://setwan.natunakab.go.id/
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	https://disdamkar.natunakab.go.id/
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	https://dkpp.natunakab.go.id/
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	https://dpmd.natunakab.go.id/
8	DINAS PERHUBUNGAN	https://dishub.natunakab.go.id/
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	http://dp3ap2kb.natunakab.go.id/

10	DINAS PERIKANAN	http://diskan.natunakab.go.id/
11	DINAS KESEHATAN	https://dinkes.natunakab.go.id/
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	https://dprkpp.natunakab.go.id/
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	http://disnakertrans.natunakab.go.id/
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	https://dpupr.natunakab.go.id/
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	http://dkp.natunakab.go.id/
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	https://dpmptsp.natunakab.go.id/

17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	https://dlh.natunakab.go.id/
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	https://dispورا.natunakab.go.id/
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	https://disdik.natunakab.go.id/
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	http://disdukcapil.natunakab.go.id/
21	DINAS SOSIAL	https://dinsos.natunakab.go.id/
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	https://diskominfo.natunakab.go.id/
23	DINAS PARIWISATA	https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	http://disperindagkopum.natunakab.go.id/
25	DINAS PERTANIAN	http://distan.natunakab.go.id/
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	https://dpad.natunakab.go.id/
27	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	https://bpp.natunakab.go.id/
28	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	https://www.bp3d.natunakab.go.id/
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	https://bkpsdm.natunakab.go.id/
30	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	https://bp2rd.natunakab.go.id/
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	http://kesbangpol.natunakab.go.id/
32	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	http://bpkad.natunakab.go.id/
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	https://bpbd.natunakab.go.id/
34	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	http://kecbungselatan.natunakab.go.id/
35	KECAMATAN SUAK MIDAI	https://kecsuakmidai.natunakab.go.id/
36	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	http://kecbungtimla.natunakab.go.id/

37	KECAMATAN SERASAN	https://kecserasan.natunakab.go.id/
38	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	https://kecbungut.natunakab.go.id/
39	KECAMATAN PULAU TIGA	https://kecpulautiga.natunakab.go.id/
40	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	https://kecbungtim.natunakab.go.id/
41	KECAMATAN PULAU PANJANG	https://kecpulaupanjang.natunakab.go.id/
42	KECAMATAN PULAU LAUT	https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
43	KECAMATAN MIDAI	https://kecmidai.natunakab.go.id/
44	KECAMATAN SERASAN TIMUR	http://kecserasantimur.natunakab.go.id/
45	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	http://kecbungtengah.natunakab.go.id/

46	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT	https://kecpulautigabaratanatunakab.go.id/
47	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	https://kecbungbaratanatunakab.go.id/
48	KECAMATAN SUBI	https://kecsubinatanunakab.go.id/
49	KECAMATAN SELUAN	https://kecseluan.natunakab.go.id/
50	Unit Layanan Pengadaan	http://ulp.natunakab.go.id/
51	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	http://rsud.natunakab.go.id/
52	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	http://lpse.natunakab.go.id/eproc4
53	JDIH	http://jdih.natunakab.go.id/
54	SATPOL PP	http://polpp.natunakab.go.id/
55	SIPETARUNG	http://sipetarung.natunakab.go.id/
56	STATISTIK	http://satudata.natunakab.go.id/
57	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG & JASA	https://ukpbj.natunakab.go.id/
58	Desa Teluk Labuh	https://teluklabuh.website.desa.id/
59	Desa Teluk Buton	https://telukbuton.desa.natunakab.go.id/
60	Desa Tapau	https://tapau.desa.natunakab.go.id/
61	Desa Tanjung Kumbik Utara	https://tanjungkumbikutara.desa.natunakab.go.id/
62	Desa Tanjung Batang	https://tanjungbatang.desa.natunakab.go.id/
63	Desa Tanjung Balau	https://tanjungbalau.desa.natunakab.go.id/
64	Desa Setumuk	https://setumuk.desa.natunakab.go.id/
65	Desa Selemam	https://selemam.desa.natunakab.go.id/
66	Desa Selaut	https://selaut.desa.natunakab.go.id/
67	Desa Selading	https://selading.desa.natunakab.go.id/
68	Kelurahan Sedanau	https://sedanau.website.desa.id/
69	Desa Sebadai Ulu	https://sebadaihulu.desa.natunakab.go.id/
70	Desa Sabang Mawang Barat	https://sabangmawangbarat.desa.natunakab.go.id/
71	Desa Sabang Mawang	https://sabangmawang.website.desa.id/
72	Kelurahan Ranai Kota	https://ranaikota.natunakab.go.id/
73	Desa Payak	https://payak.website.desa.id/
74	Desa Pangkalan	https://pangkalan.website.desa.id/
75	Desa Limaumanis	https://limaumanis-natuna.desa.id/
76	Desa Kelanga	https://kelanga.desa.natunakab.go.id/
77	Desa Gunung Putri	https://gunungputri.website.desa.id/
78	Desa Gunung Jambat	https://gunungjambat.desa.natunakab.go.id/
79	Desa Tanjung Setelung	https://desatanjungsetelung.natunakab.go.id/
80	Desa Tanjung Pala	https://desatanjungpala.natunakab.go.id/

81	Desa Tanjung	https://desatanjung.natunakab.go.id/
82	Desa Subi Besar Timur	https://desasubibesartimur.natunakab.go.id/
83	Desa Subi Besar	https://desasubibesar.natunakab.go.id/
84	Desa Sepempang	https://desasepempang.natunakab.go.id/
85	Desa Semedang	https://desasemedang.natunakab.go.id/
86	Desa Seluan Barat	https://desaseluanbarat.natunakab.go.id/
87	Desa Sededap	https://desasededap.natunakab.go.id/
88	Desa Pulau Tiga	https://desapulautiga.natunakab.go.id/
89	Desa Pulau Kerdau	https://desapulaukerdau.natunakab.go.id/
90	Desa Pengadah	https://desapengadah.natunakab.go.id/
91	Desa Meliah Selatan	https://desameliahselatan.natunakab.go.id/
92	Desa Mekar Jaya	https://desamekarjaya.natunakab.go.id/
93	Desa Kelarik Barat	https://desakelarikbarat.natunakab.go.id/
94	Desa Kelarik Air Mali	https://desakelarikairmali.natunakab.go.id/
95	Desa Kampung Hilir	https://desakampunghilir.natunakab.go.id/
96	Desa Harapan Jaya	https://desaharapanjaya.natunakab.go.id/
97	Desa Ceruk	https://desaceruk.natunakab.go.id/
98	Desa Cemaga Utara	https://desacemagautara.natunakab.go.id/
99	Desa Cemaga Selatan	https://desacemagaselatan.natunakab.go.id/
100	Desa Binjai	https://desabinjai.natunakab.go.id/
101	Desa Arung Ayam	https://desaarungayam.natunakab.go.id/
102	Desa Air Ringau	https://desaairringau.natunakab.go.id/
103	Desa Air Payang	https://desaairpayang.natunakab.go.id/
104	Desa Air Kumpai	https://desaairkumpai.natunakab.go.id/
105	Desa Cemaga	https://cemaga.website.desa.id/
106	Desa Batu Gajah	https://batugajah.website.desa.id/
107	Desa Batu Berian	https://batuberian.desa.natunakab.go.id/
108	Desa Air Nusa	https://airnusa.website.desa.id/
109	Desa Air Lengit	https://airlengit.desa.natunakab.go.id/
110	Desa Pulau Panjang	http://desapulaupanjang.natunakab.go.id/
111	Desa Kelarik	http://desakelarik.natunakab.go.id/
112	Desa Kadur	http://desakadur.natunakab.go.id/
113	Desa Gunung Durian	http://desagunungdurian.natunakab.go.id/
114	Desa Cemaga Tengah	http://desacemagatengah.natunakab.go.id/
115	PUSKESMAS KELARIK	http://puskesmas-kelarik.natunakab.go.id/
116	PUSKESMAS RANAI	http://puskesmasranai.natunakab.go.id/
117	PUSKESMAS SERASAN TIMUR	http://puskesmasserasantimur.natunakab.go.id/
118	Badan Amil Zakat Nasional	http://baznas.natunakab.go.id/
119	DEKRANASDA	http://dekranasda.natunakab.go.id/
120	INFORMASI LAYAK ANAK	http://ila.natunakab.go.id/
121	LAPOR	http://lapor.natunakab.go.id/

Sumber: Bidang e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna

III.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna per Indikator RPJMD Tahun 2025 - 2029

Urutan Penyusunannya:

1. Iku Lama per indikator beserta data dukung dan program yang mendukung kinerja utama
 2. IKU Perubahan 2025 per indikator beserta data dukung dan program yang mendukung kinerja utama
 3. Membandingkan kinerja IKU dengan Kinerja tahun sebelumnya
 4. Membandingkan Kinerja IKU dengan Kinerja RPJM dan Kinerja Kabupaten Kota seKepri
 3. Realisai anggaran dan kinerja
 4. Hasil Rekomendasi LHE
- Untuk Lampiran
1. Perjanjian kinerja awal dan perubahan (yang Berubah)
 2. Pengukuran kinerja awal dan perubahan (yang Berubah)
 3. Tabel capaian akhir kinerja renstra

(Sebelum realisai kinerja dan anggaran)

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati melalui perkembangan di sektor komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah merancang kebijakan perencanaan jangka menengah (Rentra) untuk periode 2022-2026. Pada tahun 2024, dilakukan evaluasi rutin yang dilakukan tiap tahun oleh inspektorat berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut:

- 3.1.1 Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah dan Jangka Pendek pada website Dinas Komunikasi dan Informatika secara tepat waktu.
- 3.1.2 Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan dengan target jangka menengah pada laporan kinerja.
- 3.1.3 Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- 3.1.4 Melakukan definisi operasional yang jelas atas pengukuran kinerja

Dalam pemenuhan hasil rekomendasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berusaha untuk menerapkannya dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

3.1.1 Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah dan Jangka Pendek pada website Dinas Komunikasi dan Informatika secara tepat waktu.

Apa Perbedaan antara RPJMD dan RKPD? Berikut penjelasannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Mengacu kepada hal diatas maka beberapa dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah melakukan Upload data yang terdiri dari :

3.1.1 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dokumen ini telah disusun dan dipublikasikan pada halaman website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika

(<https://www.diskominfo.natunakab.go.id>).

Adapun dokumen yang di upload adalah :

1. Rencana Strategis;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI).

3.1.2 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Begitu juga Dokumen ini telah disusun dan dipublikasikan pada halaman website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika

(<https://www.diskominfo.natunakab.go.id>)

Adapun dokumen yang di upload adalah :

1. Rencana Aksi;
2. Rencana Kerja Tahunan;
3. Perjanjian Kinerja;
4. Laporan Kinerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Juga melakukan Publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah dan Jangka Pendek pada (<http://ppid.natunakab.go.id/>)

Terkait ketepatan waktu unggahan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya untuk melaksanakannya, namun terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah penilaian yang baru

diterbitkan pada awal bulan di tahun berikutnya, sehingga diperlukan penyesuaian dengan menggunakan data dari periode sebelumnya. Akibatnya, data terbaru tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan.

3.1.2 Menginformasikan perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada laporan kinerja

Penetapan target yang telah ditentukan dijelaskan dalam BAB II laporan kinerja ini. Realisasi pencapaian target jangka menengah dimulai dari tingkat pelaksanaan hingga mencapai eselon II (Kepala Dinas). Dinas Komunikasi dan Informatika diarahkan pada misi 6 dan 7, di mana misi 6 berfokus pada pelaksanaan umum, karena sifatnya yang serupa dengan program dan kegiatan di berbagai OPD. Indikator sasaran pada misi ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sementara itu, misi 7 melibatkan program yang sebagian telah mengadopsi prinsip Kriteria SMART, dengan indikator kinerja, tujuan, sasaran, serta program yang saling terkait. Evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan I, II, III, dan IV (Data Terlampir II).

Pada tahun 2024, pemantauan kegiatan fisik dan keuangan mencakup pengukuran kemajuan kerja dan kinerja SDM serta pelaksanaan fisik Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pencapaian target Dinas maupun target yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Natuna. Hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan dan penyelenggaraan sektor komunikasi dan informatika. Tingkat pencapaian ini akan menjadi indikator keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya digunakan untuk merealisasikan target jangka menengah sebagai tolak ukur pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah. Selain itu, hal ini juga menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Semua upaya tersebut merupakan bagian dari Rencana Strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan teknologi informasi, memastikan ketersediaan informasi yang aman, berkualitas, stabil, dan mudah diakses. Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memanfaatkan teknologi informasi melalui tautan <http://ekejap.natunakab.go.id/account/login>.

Untuk pemantauan kegiatan fisik dan keuangan, digunakan platform yang dapat diakses melalui tautan <https://sismonkab.natunakab.go.id>. terkait pencapaian target Dinas maupun target yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Natuna dalam rangka perkembangan dan

penyelenggaraan di sektor komunikasi dan informatika dapat terpenuhi, meskipun dengan segala hambatan yang ditemui. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 13 Rencana Aksi DisKominfo Natuna Tahun 2024

Prioritas Daerah	Sasaran	Urusan	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi
Percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai laporan LKJiP	Nilai	81,30	75,25
				Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai sop	Persen	85	100
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah	Persen	74,77	59,71
		Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Program aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persen	21	100
		Urusan pemerintahan bidang statistik	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase opd yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Persen	81	75

Dari tabel di atas adalah penjelasan dan hubungan antara fokus utama daerah dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada tahun 2024. Selanjutnya, informasi tersebut dapat diuraikan menjadi berbagai kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung efektivitas kerja dan pencapaian dalam penyelenggaraan di sektor komunikasi dan informatika yang terdiri dari 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan pada anggaran APBD Murni sedangkan pada APBD Perubahan menjadi 9

Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan bertambahnya 2 sub kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi fasilitas kerja yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya menjadi kebutuhan penting dalam mendukung peningkatan

pelaksanaan tugas dan kinerja serta Dalam upaya mencapai Prioritas Daerah yang ditekankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna, yaitu :

- c. Percepatan Reformasi Birokrasi;
- d. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari setiap prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merinci tujuan, sasaran, dan indikator dalam Rencana Strategis. Prioritas pertama memiliki tujuan yang terkait erat dengan prioritas kedua yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Kedua sasaran prioritas tersebut akan disusun IKK (Indikator Kinerja Kunci) dari IKK ini maka dipilih dan disusun kesesuaian yang akan dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan memperhatikan kedua prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menyusun lima tujuan utama dengan indikator tujuan dalam Rencana Strategis. Terdapat juga sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai tujuan strategis tersebut yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 14 Lima tujuan utama dengan indikator tujuan dalam Rencana Strategis Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Realisasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024	Realisasi
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks SPBE	3,10	3,61	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	70,36	76,00
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi dan Komunikasi	62	68,61	Meningkatnya publikasi informasi dan komunikasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	80	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Realisasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024	Realisasi
3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Persentase Release Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Tepat Waktu	62	70	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate	65	100,36
4	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	81,40	75,25	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	81,35	75,25
5	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,4	24,225	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,41

Hubungan antara target dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada periode 2021-2026 dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 15 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Rencana Strategis, Sasaran dan Indikator IKU Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Realisasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024	Realisasi
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks SPBE	3,10	3,61	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	70,36	76,00

Tabel tersebut menjelaskan mengenai keterkaitan Tujuan yang akan dicapai beserta target pencapaian tujuan yang diperoleh dari sasaran utama yang ditetapkan sebagai indikator kinerja Utama telah disusun. Peningkatan kinerja

pada indikator sasaran diharapkan berdampak positif pada pencapaian indikator tujuan yang ditargetkan.
Capaian kinerja berdasarkan indikator tujuan yaitu:

1. Indeks SPBE

Penerapan Indeks SPBE memiliki tujuan antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas. Kemudian, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Melalui Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, beserta lampirannya tentang Dokumen Referensi Arsitektur SPBE Nasional serta Permen PAN-RB No. 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE serta kebijakan terkait lainnya pemerintah Kabupaten Natuna sudah melakukan penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Tahun 2019 – 2023 dan di evaluasi oleh kemen PAN-RB pada tahun 2021 dengan target Nilai 2,71 (Baik) dimana Nilai Indeks SPBE untuk Kabupaten Natuna berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB adalah 2,24 (Cukup).

Sedangkan untuk Tahun 2022 melalui SK Menpan RB No.108 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022 dengan hasil **2,50 (Cukup)** dari target sebesar 2,80 (Baik)

Untuk Tahun 2023 melalui SK Kemenpan RB nomor 13 tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Hasil **3,19 (Baik)** dari Target 2,90 (Baik)

Pada tahun 2024, Evaluasi SPBE untuk memperoleh Nilai Indeks SPBE dilakukan melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui tautan: <https://tauval.spbe.go.id/>. Proses ini dikelola langsung oleh Kementerian PAN-RB. Dalam aplikasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berperan sebagai pengelola data sebelum Nilai Indeks SPBE resmi diterbitkan oleh Menpan-RB, dengan mengikuti tahapan informasi mengenai progres evaluasi yang terdiri dari :

1. Penilaian Mandiri
2. Penilaian Dokumen
3. Penilaian Interview
4. Penilaian Visitasi
5. Harmonisasi
6. Final

Tahapan yang dilalui oleh dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna pada point 1 sampai dengan 3 hasil dari evaluasi ini menghasilkan Penilaian Mandiri, dimana dari hasil nilai indeks SPBE yang terlaksana dari

hasil penilaian mandiri adalah 3,90 (Sangat Baik) sedangkan Penilaian Akhir hasil dari penilaian Kementerian PAN-RB untuk nilai Indeks SPBE ditahun 2024 ini Adalah 3,61 (Sangat Baik)

Tabel 16 Perbandingan pencapaian Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 s/d 2024

Indikator Tujuan	Proyeksi Berjalan	Target	Pencapaian		
	2022	2023	2022	2023	2024
Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Natuna	2,80	2,90	2,50	3,19	3,61

Tabel 17 Predikat Indeks SPBE

NO.	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian : Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Tabel 18 Domain dan Aspek penilaian Index SPBE

Indeks
SPBE
Domain Kebijakan SPBE

Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE
Domain Tata Kelola SPBE
Perencanaan Strategis SPBE
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penyelenggaraan SPBE
Domain Manajemen SPBE
Penerapan Manajemen SPBE
Audit TIK
Domain Layanan SPBE
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Tabel 15 Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Kedua Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Realisasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024	Realisasi
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi dan Komunikasi	53	68,61	Meningkatnya publikasi informasi dan komunikasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	80	100

2. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi dan Komunikasi

Penyampaian informasi kepada publik mengenai kerja dan kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna menjadi keharusan di era keterbukaan informasi saat ini. Dengan kemudahan penyebaran informasi, masyarakat

dapat mengetahui pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, yang sekaligus menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai kinerja Pemerintah daerah, peran media sangat mempengaruhi dalam hal penyampaian dan penyebaran informasi kekalayak ramai

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam

menjaga kualitas informasi yang tersebar di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama dengan berbagai media agar penanganan informasi dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, kerja sama ini terus ditingkatkan guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkualitas dan relevan.

Sampai saat ini tercatat ada beberapa media sosial milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana berkomunikasi. Berikut ini data media sosial milik Pemerintah daerah yang dapat diakses oleh Masyarakat.

TABEL 16 DATA MEDIA PUBLIKASI YANG DIGUNAKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Nb	OPD	Media Sosial				Web OPD	Youtube	TikTok	Keterangan
		FB	IG	X	Treads				
A	INSPEKTORAT								
1	Inspektorat	√	√	x	x	√	-	x	
B	SEKRETARIAT								
2	Sekretariat Daerah	√	√			√	√		
3	Sekretariat DPRD		√			√	√		
C	DINAS								
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√	√	√	
5	Dinas Perikanan					√			
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	√			√	√		
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					√			
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√			√	√		
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					√	√		
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					√	√		
11	Dinas Pariwisata	√	√	√		√			
12	Dinas Kesehatan					√			
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					√			
14	Dinas Perhubungan	√	√			√			
15	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√		√	√		
16	Dinas Pemadam Kebakaran	√	√				√		

Nb	Perangkat Daerah	Media sosial				Web OPD	Youtube	TikTok	Keterangan
		FB	IG	X	Treads				
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					√	√		
18	Dinas Sosial					√			

19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB					√			
20	Dinas Pemuda dan Olahraga					√			
21	Dinas Pangan dan Pertanian	√	√			√	√		
22	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√			√			

D	BADAN								
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	√	√		√	√		
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah					√			
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					√			
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik					√			
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√	√		√	√		
E	INSTANSI LAINNYA								
28	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	√	√	√		√			
F	INSTANSI VERTIKAL								
29	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	√	√	√		√	√		
30	Badan Pusat Statistik	√	√	√		√	√		
G	INSTANSI NON PEMDA								
31	Layanan Pengadaan Secara Elektronik						√		
32	KPU Natuna	√	√	√		√	√		
H	KECAMATAN								
H	Kecamatan Bunguran Timur					√			
33	Kecamatan Bunguran Utara					√			
34	Kecamatan Bunguran Timur Laut					√			
35	Kecamatan Bunguran Selatan					√			
36	Kecamatan Pulau Tiga					-			
37	Kecamatan Pulau Tiga Barat					√			
38	Kecamatan Serasan					√			
39	Kecamatan Serasan Timur	-	-	-		√	-		

Keterangan :

1. √ Ada
2. X Tidak ada
3. - Ada Tapi Tidak Aktif

Sumber data : <https://natunakab.go.id/perangkat-daerah/>

3. Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalin kerja sama dengan 97 media. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kualitas serta menjaga kredibilitas informasi yang tersebar luas di masyarakat.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengoperasikan platform media online sebagai sarana penyebarluasan informasi. Melalui media ini, informasi dirancang dan disesuaikan secara mandiri untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Media komunikasi publik online ini dikelompokkan berdasarkan platformnya untuk mendukung pengelolaan konten dan publikasi informasi yang lebih efektif, adapun platform nya adalah sebagai berikut :

- 1

Media Cetak (Baleho, Spanduk)
- 2

Media Audio (Radio)
- 3

Media Visual (Gambar dan Foto)
- 4

Media Audio Visual (ada Unsur gambar dan suara)
- 5

Media Sosial (IG, FB, X dan Treads)
- 6

Media Website (Web OPD)
- 7

Media Audio Visual Online (Youtube, Tiktok)

Pada prinsipnya tujuan pelaksanaan komunikasi publik adalah membangun citra dan reputasi institusi dan pengelola komunikasi publik sebagai salah satu instansi pemerintah, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, hingga upaya mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program

Tabel 15 Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Ketiga Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024

Nb	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Realisasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024	Realisasi
----	--------	------------------	----------------------------	-----------	---------	-------------------	-----------------------------	-----------

3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Persentase Release Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Tepat Waktu	62	70	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate	65	100.36
---	--	--	----	----	--	--	----	--------

3. Persentase Release Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Tepat Waktu

Data statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa mendatang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Sejauh ini release Data Statistik Sektoral yang dilakukan sudah tepat waktu, namun untuk keakuratan datanya masih perlu kajian yang lebih mendalam. Sedangkan dalam hal ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate dinas komunikasi melaksanakan pengumpulan data sektoral dari seluruh OPD, Kecamatan dan perangkat desa di Kabupaten

Natuna untuk memperoleh data yang dihasilkan yang akan dijadikan bahan informasi dan data sektoral kabupaten Natuna, dinas komunikasi dan informatika juga sudah menghubungkan ke portal satu data Indonesia

Tabel 16 Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Keempat Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Realisasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024	Realisasi
4	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	81,40	75,25	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	81,35	75,25

4. Nilai SAKIP

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi instansi pemerintah. Sistem ini penting dalam reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan bersih, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat kapasitas birokrasi. Evaluasi implementasi SAKIP dilakukan untuk mengukur efektivitas penerapannya, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan peningkatan kinerja sesuai RPJMD, Evaluasi mencakup analisis sistematis, pengumpulan data, pemberian solusi, dan monitoring kinerja, dengan fokus pada kecepatan data serta kegunaannya. Lingkup evaluasi meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, dan kebijakan Perangkat Daerah. Tujuan evaluasi adalah memperoleh informasi implementasi, menilai tingkat pelaksanaan, memberikan saran, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi.

Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah meskipun ada keterbatasan sumber daya. Sebelum SAKIP dilaksanakan penilaiannya Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun LAKIP Diskominfo dimana penyusunan ini dilaksanakan dalam memenuhi kriteria dalam penilaian SAKIP, isi dari LAKIP ini merupakan penjelasan akan kerja dan kinerja serta kinerja keuangan yang dibahas secara singkat dan jelas yang menggambarkan situasi program dan kegiatan yang berjalan di OPD Diskominfo Natuna Selama 1 Tahun periode.

Tabel 15 Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Kelima Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Realisasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024	Realisasi
5	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,4	24,225	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,41

5. Indeks Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik atau PEKPPP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2024 ini, didasarkan pada

sembilan layanan yang diprioritaskan dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sembilan layanan tersebut adalah layanan pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, pertukaran data, serta portal layanan publik.

PEKPPP merupakan Upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Hasil indeks pelayanan publik dijadikan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi.

Indikator evaluasi pelayanan publik ini adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan. Nilai indeks pelayanan publik yang nantinya diterima oleh unit, dilihat pula dari penilaian atau persepsi masyarakat, komitmen tata kelola, dan penilaian ahli sesuai bukti dukung serta kesesuaian jawaban.

Tujuan akhir dari penilaian ini adalah pelayanan publik berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, Adapun untuk hasil indeks pelayanan publik tahun 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20 : Perbandingan Hasil Indeks Pelayanan Publik 2022 s/d 2024 Diskominfo Natuna

	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Capaian Target	Capaian (%)
Tahun 2022						
1	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indek Pelayanan Publik	Indeks	4,3	3,00	69,77
Tahun 2023						
2	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indek Pelayanan Publik	Indeks	4,3	2.4	55,81
Tahun 2024						
3	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indek Pelayanan Publik	Indeks	4,4	2.4	54,55

Dari hasil tabel diatas menjelaskan bahwa indeks pelayanan publik Diskominfo natuna mengalami penurunan yang signifikan sehingga perlu adanya perubahan dan pelaksanaan yang lebih baik serta pemahaman tentang indeks pelayanan publik lebih

ditingkatkan sehingga salah satu dari sembilan layanan yang diprioritaskan dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indikator evaluasi pelayanan publik ini adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan diskominfo bisa terlaksana dan mampu kedepannya menjadi lebih baik.

Capaian kinerja berdasarkan sasaran secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN IKU	INDIKATOR IKU	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Realisasi Peningkatan TIK/Target Peningkatan TIK x 100%	Persen	70,36
2	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	Cakupan Informasi yang Dipublikasikan@Melalui Berbagai Media/Target Informasi x 100%	Persen	80
3	Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate	Data Statistik Sektoral yang Terupdate/Target Data Statistik Sektoral x 100%	Persen	65

1. Sasaran Strategis IKU 1 “Meningkatnya pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Dengan indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama yaitu: **Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

Untuk pencapaian Kinerja pada IKU 1 ini Dinas Komunikasi dan Informatika dihitung dari Peningkatan TIK yang terdiri dari:

- g. Aset TIK;
- h. Akses Internet Titik Layanan Publik;
- i. Desa Tercover Layanan 4G;
- j. PD (Perangkat Daerah) terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- k. Aplikasi Umum yang diimplementasikan Oleh Perangkat Daerah;
- l. Website Perangkat Daerah (Termasuk Desa).

Adapun Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 21
Indikator Kinerja Utama 1 & Formulasi Perhitungannya
Dalam Pencapaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	$\frac{\text{Realisasi Peningkatan TIK}}{\text{Target Peningkatan TIK}} \times 100\%$	Peningkatan TIK 7. Aset TIK 8. Akses Internet Titik Layanan Publik 9. Desa tercoverage Layanan 4G 10. PD Terkoneksi Jaringan Intra Pemda 11. Aplikasi Umum yang diimplementasikan oleh PD 12. Website Perangkat Daerah (Termasuk Desa)

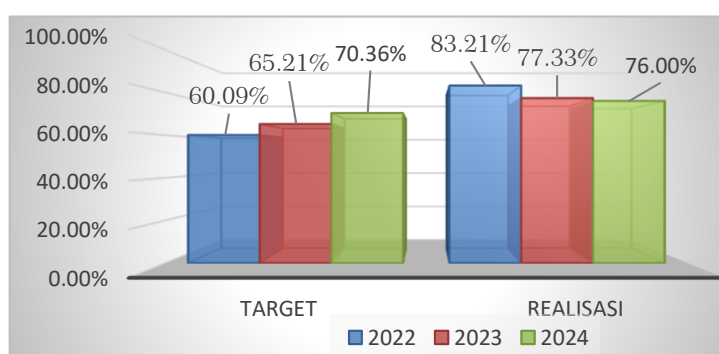
Dalam Pencapaian Prioritas Daerah yang akan dicapai Oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yaitu :

Tabel 22
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran IKU 1 Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Awal	TARGET (2024)	REALISASI	Capaian 2024(%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	55,27	70,36	76,00	108,02

Program dan kegiatan tahun anggaran 2024 yang mendukung secara langsung pencapaian Indikator IKU 1 : Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari 1 (Satu) Program, 2 (Dua) kegiatan dan 5 (Empat) Sub Kegiatan serta 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan dalam hal persandian untuk pengamanan informasi sebagai pendukung pelaksanaan peningkatan teknologi dan informasi di kabupaten natuna

Grafik 5
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Tahun 2022 s/d 2024



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk pengembangan aplikasi berbasis online dan desktop. Dinas ini juga terus berupaya menyediakan akses internet yang memadai, meskipun masih ada beberapa titik yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Komitmen ini mendukung implementasi e-government di OPD, kecamatan, desa, serta fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Diharapkan, akses internet yang optimal dapat mempercepat penyebaran informasi, berita, dan literasi bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama, Dinas Komunikasi juga telah menetapkan enam target penting untuk meningkatkan teknologi dan informasi di wilayahnya.

g. Aset TIK

Infrastruktur TIK Pemerintah Kabupaten Natuna mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas pendukung untuk mendukung sistem, aplikasi, komunikasi, serta pengolahan dan penyimpanan data. Infrastruktur ini juga meliputi perangkat integrasi dan elektronik lain yang mendukung operasional pemerintahan.

Tabel 23 Rekapitan Aset Tetap TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna

No	Nama Barang TIK	Tahun			Jumlah Barang
		2022	2023	2024	
1	Camera + Attachment				1
2	Video Conference		6		8
3	Camera Film		2		2
4	Mainframe (Komputer Jaringan)				1
5	A.C. Split		16		16
6	Internet				6
7	Lemari Kayu		3		3
8	Tripod Camera		3		3
9	Local Area Network (LAN)				2
10	Internet				6
11	PC Unit		4		1
12	Laptop		2		18
13	Notebook		1		7
14	Printer	1	1		13
15	Peralatan Jaringan				2
16	Filling Cabinet Besi			3	3
17	LCD Projector/Infocus			1	1
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector			1	1
19	Meja Kerja Kayu			41	41

20	Kursi Putar			41	41
21	Sound System			1	1
22	Meja Kerja Pejabat Eselon II			2	2
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III			3	3
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV			5	5
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon II			1	1
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			3	3
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			5	5
28	Microphone/Wireless MIC			2	2
29	Mixer PVC			1	1
30	Layar Film/Projector			3	3
31	Kamera Udara			2	2
32	Loudspeaker			1	1
33	Kursi Tunggu			2	2
34	Meja Rapat			1	1
35	Kursi Rapat			20	20
36	UPS			29	29
37	Penghancur Kertas			3	3
38	Meja stasiun kerja ruang kontrol professional furnitur kantor tinggi Stan duduk dapat diatur ruang pusat control meja			1	1
39	Taff STUDIO CLight Stand Tripod Studio130cmwith Ekstension Arm-CD-50 Silver			4	4
40	GVM1200D-RGBHight BeamBi- Color&Hight Power50WLED Video Light			6	6
41	GODOXPAKETLIGHTING SETPOD CAST GODOX SK-400II			1	1
42	Hard Case Box Cable Audio			2	2
43	ZOOMH6HANDY RECORDER+WHINSHIELD			1	1
44	RodePSA1+prostudioarm			4	4
45	MICROPHONE CABLE superlux			4	4
46	AUDIOAMPLIFIER AUDER PRODIGITAL AMPLIFIER HARDCORE AD-450PD			1	1
47	Headphone Monitor Hardwell HPH007			4	4
48	Yamaha HS-8			2	2
49	MIXER PVC Mixer			1	1
50	TURNTABLE tascammixcast4			1	1
51	SEAGATE (Hardis)			8	8
52	Meja stasiun kerja ruang control professional			1	1
53	Taff STUDIO CLight Stand Tripod Studio130cmwith Ekstension Arm-CD-50 Silver			4	4
54	GVM1200D-RGBHight BeamBi-Color & Hight Power 50W LED Video Light			6	6
55	GODOX PAKET LIGHTING SETPOD CAST GODOX SK-400II			1	1
56	HardCaseBoxCableAudio			2	2

57	HOLLYLAND LARK MAX DUO (mikropon wireles)			2	2
58	Kingma NP-FW50 for A6000 A6400 A7 II Paket 2 Battery 1 Dual Charger			6	6
59	HT			25	25
60	PAKET SOUND SYSTEM OUTDOOR			1	1
61	kamera SONY A6700			4	4
62	LAMPU BLITZ KAMERA FLASH			2	2
63	LENSA KAMERA SONYFE24-70MMF4			4	4
64	LENSA KAMERA SONYLENSATELEE 70-350MMGOSS			1	1
65	TAS KAMERA SLING BAG			3	3
66	MEMORI LEXAR KARTU MEMORI			6	6
67	LEMARI BESI METAL			2	2
68	HFI 16 Kontainer Box			4	4
69	Autocueqtv Starter Series 15" Teleprompter Package With Qstart Software Autocue/qtv (TELEPROMTER)			1	1
70	TV LCD SAMSUNG 27 INCH FUL HD			1	1
71	GEEKOM MINI PC A5 32GB/512 GB AMD			1	1
72	HATSET BASEUS BOWI D03			1	1
73	REAPITER MOBILE VIEWSONIC VA1655			1	1
74	HDMI SPLITER			1	1
75	GIMBAL STABILIZEL HP			1	1
76	EVERBRAIT R20 DRY BOX			1	1
77	HOLLYLAND PYRO H 4K HDMI WIRELEEL			2	2
78	AVMATRIK SWITCHER			1	1
79	YOLOLIV YOLOBOX PRO			1	1
80	HAGIBIS 4K HDMI VIDIO			1	1
81	APPLE iPhone 13- 4/128 GB			1	1
82	SAMSUNGGalaxy S24 8/256GB			1	1
83	Panasonic HC-X2000UHD 4K Professional Camcorder			3	3
84	TakaraTripod Hydro A16			6	6
85	Focusrite Scarlett 2i24 th Gen			1	1
86	HOLLYLAND SOLIDCOM C1-6S WIRELESS INTERCOM HEADSET SYSTEM FULL DUPLEX			1	1
87	Server			1	1
88	Tenda			1	1
89	Mesin Pompa Air			2	2
90	Toolkit			2	2
91	Lemari BESI			2	2
92	Kontainer			4	4
93	Lampu Senter			2	2
TOTAL					413

*Sumber : KIB B Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika tahun

2024

h. Akses Internet Titik Layanan Publik

Penyediaan akses internet adalah program untuk menyediakan layanan internet kepada masyarakat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai latihan kerja, dan pos lintas batas negara. Melalui penyediaan akses internet ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital dan

memperluas akses informasi, serta meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melibatkan mereka secara lebih aktif dalam dunia digital.

Tabel 24 Rekapitulasi Data Akses Internet Titik Layanan Publik (Puskesmas, Sekolah dan Ruang Publik/Perkantoran)

NO	NAMA LOKASI	Titik Akses
1	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	74
2	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	19
3	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	11
4	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	17
5	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	21
6	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	16
7	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI	16
8	KECAMATAN PULAU TIGA	14
9	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT	10
10	KECAMATAN MIDAI	10
11	KECAMATAN SUAK MIDAI	6
12	KECAMATAN SERASAN	14
13	KECAMATAN SERASAN TIMUR	11
14	KECAMATAN SUBI	10
15	KECAMATAN PULAU LAUT	12
16	KECAMATAN PULAU SELUAN	4
17	KECAMATAN PULAU PANJANG	3
JUMLAH		268

*Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024

i. Desa Tercover Layanan 4G

Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas salah satu tugas utama yaitu menyediakan konektivitas internet untuk lembaga pemerintah dan masyarakat, harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ketersediaan internet, terutama di daerah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang belum terjangkau oleh jaringan fiber optik. Solusi yang dapat diaplikasikan meliputi penggunaan teknologi satelit dan internet wireless/radio link.

Sebagai contoh spesifik, Desa Terkover, yang telah terlayani oleh jaringan 4G, merupakan salah satu dari banyak area yang menikmati akses internet cepat. Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, telah berhasil mendokumentasikan sebanyak 153 menara BTS (Base Transceiver Station). BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan stasiun pemancar. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler dan sejenis gadget lainnya. Tower BTS bentuknya bisa bervariasi, ada yang kaki segi empat, kaki segitiga, bahkan ada yang hanya berupa pipa panjang saja atau menara

operator seluler yang tersebar di seluruh kabupaten, rincian dari data ini tersaji dalam tabel Dibawah ini :

Tabel 25 Rekapitulasi Jumlah Menara OPSEL/BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	TOWER/ MENARA BTS / OPERATOR SELULER (OPSEL)						
	TSEL	Indosat	XL	Smartfren	POI	Repeater	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(12)
Midai	3	1	1	-	-	-	5
Bunguran Barat	7	2	5	1	-	1	16
Serasan	6	1	2	-	-	1	10
Bunguran Timur	20	2	7	13	1	1	44
Bunguran Utara	6	-	2	-	-	-	8
Subi	2	1	1	-	-	1	5
Pulau Laut	3	2	-	-	1	1	7
Pulau Tiga	6	-	1	-	-	1	8
Bunguran Timur Laut	5	1	5	1	-	-	12
Bunguran Tengah	4	-	3	2	-	-	9
Bunguran Selatan	3	-	1	2	-	-	6
Serasan Timur	2	-	2	-	-	-	4
Bunguran Batubi	3	-	2	1	-	-	6
Pulau Tiga Barat	2	2	1	-	-	-	5
Suak Midai	4	-	-	-	-	-	4
Pulau Seluan	1	-	1	-	-	-	2
Pulau Panjang	1	-	1	-	-	-	2
Tahun 2023	78	12	35	20	2	6	153
Tahun 2022	73	12	32	20	1	5	143

Tabel 26 Data Kualitas Layanan BTS/OPSEL Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Layanan				POI	Repeater	Non Aktif	Keterangan
	4G	3G	2G	G				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Midai	4	-	-	-	-	-	1	2. Indosat Reguler (di Sebelat OFF)
Bunguran Barat	12	-	-	-	-	1	2	4. Indosat Reguler OFF, 5. Repeater XL Reguler,

								6. Tsel USO Bakti OFF,Propose Upgrate atau relokasi
Serasan	6	-	-	-	-	1	2	3. Indosat Reguler OFF & Repeater IPLH 4. TSEL USO Bakti OFF Propose relokasi
Bunguran Timur	40	-	-	-	1	1	-	1. Repeater XL USO BAKTI 2. POI XL USO BAKTI
Bunguran Utara	7	-	-	-	-	-	1	1. TSEI Reguler 2. TSEL USO Reguler (eks BAKTI OFF
Subi	2	-	-	-	-	1	1	3. Indosat Reguler OFF 4. Repeater IPLH
Pulau Laut	4	-	-	-	-	1	1	2. Indosat Reguler OFF
Pulau Tiga	6	-	-	-	-	1	-	1. Repeater IPH
Bunguran Timur Laut	11	-	-	-	-	-	1	2. Indosat Reguler OFF
Bunguran Tengah	8	-	-	-	-	-	1	2. TSEI USO Bakti OFF
Bunguran Selatan	6	-	-	-	-	-	-	
Serasan Timur	3	-	-	-	-	-	-	
Bunguran Batubi	6	-	-	-	-	-	-	
Pulau Tiga Barat	4	-	-	-	-	-	1	2. Indosat Reguler OFF
Suak Midai	4	-	-	-	-	-	-	
Pulau Seluan	2	-	-	-	-	-	-	
Pulau Panjang	2	-	-	-	-	-	-	
Tahun 2023	127	0	0	0	1	6	11	
Tahun 2022	125	0	0	0	1	5	7	

BTS (Base Transceiver Station) adalah bagian yang paling krusial dan membatasi dalam sebuah sistem, sehingga sangat menentukan kapasitas dan kualitas sistem secara menyeluruh. Kapasitas dan kualitas sistem umumnya bergantung pada BTS, sehingga kekuatan utama operator terletak pada kapasitas mereka untuk menyediakan jumlah BTS yang cukup, termasuk penempatan yang efisien dan sesuai dengan karakteristik area layanan.

Ditahun 2021 Terdapat peningkatan jumlah tower/BTS sebanyak 119 dengan bertambahnya sebanyak 25 Tower/BTS, diakhir tahun 2020 berjumlah 94 tower/BTS dan pada akhir 2022 Peningkatan jumlah tower menjadi 143 tower/BTS dengan rincian penambahan Telkomsel (Reguler) 9, XL (reguler) 2, Smartfren (reguler) 5, XL USO 12, Pada tahun 2021, terdapat peningkatan kualitas sinyal menjadi 4G 106 dari yang sebelumnya sebanyak 68 Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022 menjadi 125 layanan 4G dan tahun 2023 sebanyak 127 layanan 4G

Sedangkan untuk kualitas layanan BTS/OPSEL ada beberapa layanan yang nonaktif Tahun 2022 ini kabupaten Natuna yang

sudah menerima program bantuan pembangunan tower/BTS dari Bakti Kemkominfo RI berjumlah 43 unit yang menyebar di 15 Kecamatan dan dilayani 4 operator seluler, Namun dari semua tower /BTS tersebut, 50% lebih masih menggunakan VSAT (satelit) yang dirasa kualitasnya masih sangat rendah dibanding dengan tower /BTS yang sudah menggunakan transmisi Radiolink maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melakukan permohonan Peningkatan Tower/BTS USO Bakti Kemkominfo RI melalui solusi teresterialisasi melalui existing tower terdekat.

Untuk tahun 2023 perubahan dan peningkatan layanan BTS/Opsel lebih menitik beratkan kepada pelayanan kekuatan sinyal 4G di beberapa daerah yang terasa kurang pada sinyal jaringan dimana ada beberapa operator seluler (OPSEL) melaksanakan relokasi dan upgrade dan mendata beberapa BTS/Opsel yang aktif dimana total Tower (BTS, Repeater & POI) masih dalam kondisi aktif adalah 134, antara lain : 74 Tower TSEL, 5 Tower Indosat, 35 Tower XL dan 20 Tower Smartfren

Berikut penjabarannya :

- Dari Tower BTS dengan Opsel TSEL ada 78 : **Aktif 74** & Tidak Aktif (OFF) 44 Tower BTS yang sudah tidak aktif (OFF) antara lain :
 - 1 Tower BTS TSEL Reguler (eks USO BAKTI Kemkominfo RI) di Teluk Buton; dan
 - 3 Tower BTS TSEL USO BAKTI Kemkominfo RI, sedang dalam propose upgrade dan atau relokasi, dikarenakan sudah ada Tower BTS Reguler di lokasi (Kelurahan/Desa) yang sama. Yaitu di Kelurahan/Desa : Selaut, Tanjung Setelung dan Air Lengit
- Dari Tower BTS dengan Opsel Indosat 12 : **Aktif 5**, Tidak Aktif (OFF) 77 Tower BTS yang sudah tidak aktif (OFF) adalah milik swasta (reguler), antara lain di Kelurahan/Desa :
 - Kel. Sedanau, Kec. Bung. Barat;
 - Desa Subi, Kec. Subi;
 - Desa Limau Manis, Kec. Bung. Timur Laut;
 - Desa Kadur, Kec. Pulau Laut;
 - Kel. Serasan, Kec. Serasan;
 - Desa Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat.
 - Desa Sebelat, Kec. Midai;
- Dari Tower BTS dengan Opsel **XL 35**, semuanya masih dalam kondisi aktif.

- Dari Tower BTS dengan Opsel **Smartfren 20**, semuanya masih dalam kondisi aktif.

Dengan Peningkatan dan pemanfaatan infrastruktur operator dengan baik dan melaksanakan pemantauan titik-titik yang terindikasi lemah dalam penerimaan sinyal diharapkan mewujudkan system pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE untuk kabupaten Natuna Semakin Baik.

Tabel 27 Desa dan Kelurahan yang dapat Mengakses Internet

Kecamatan n	Kel/Desa	OPSEL			Layanan		POI	Repeater	Keterangan
		TSEL	Indosat	XL	Smartfren	4G			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Midai	Kelurahan Sabang barat	2	0	0	0	2	0	0	
	Sebelat	1	1	1	0	2	0	0	Indosat reg OFF
	Air putih	0	0	0	0	0	0	0	
Total		3	1	1	0	4	0	0	Indosat reg (di Sebelat) "OFF"
Bunguran Barat	Kelurahan Sedanau	3	1	3	0	6	0	0	Indosat reg OFF
	Mekar Jaya	1	0	1	0	2	0	0	
	Binjai	1	1	1	1	3	0	1	Repeater regular
	Pian Tengah	1	0	0	0	1	0	0	
	Selaut	1	0	0	0	0	0	0	TSEL USO BAKTI OFF propose upgrade dan atau relokasi
Total		7	2	5	1	12	0	1	Indosat reg (di Kelurahan Sedanau) Tsel USO BAKTI (di Selaut) "OFF"
Serasan	Kelurahan Serasan	2	1	0	0	1	0	1	Indosat reg OFF & Repeater IPLH
	Kampung Hilir	0	0	0	0	0	0	0	
	Batu Berian	0	0	1	0	1	0	0	
	Tanjung Setelung	2	0	0	0	1	0	0	TSEL USO BAKTI OFF propose relokasi

Kecamatan n	Kel/Desa	OPSEL			Layanan		POI	Repeater	Keterangan
		TSEL	Indosat	XL	Smartfren	4G			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tanjung Balau	1	0	0	0	1	0	0	
	Pangkalan	1	0	0	0	1	0	0	
	Jermalik	0	0	1	0	1	0	0	
Total		6	1	2	0	6	0	1	Indosat reg (di Kelurahan Serasan) & TSEL USO BAKTI (di Tanjung Setelung) “OFF”
Bunguran Batubi	Batubi Jaya	1	0	0	0	1	0	0	
	Gunung Putri	1	0	0	0	1	0	0	
	Sedarat Baru	0	0	1	1	2	0	0	
	Sedanau Timur	1	0	1	0	2	0	0	
	Semedang	0	0	0	0	0	0	0	
Total		3	0	2	1	6	0	0	
Bunguran Timur	Kelurahan Ranai Kota	6	1	3	4	13	0	1	Repeater USO BAKTI
	Kelurahan Ranai Darat	2	0	0	2	4	0	0	
	Kelurahan Bandarsyah	3	0	1	2	6	0	0	
	Kelurahan Batu Hitam	3	0	0	2	5	0	0	
	Sungai Ulu	3	1	2	1	6	1	0	POI XL USO BAKTI
	Sepempang	2	0	1	1	4	0	0	
	Batu Gajah	1	0	0	1	2	0	0	
Total		20	2	7	13	40	1	1	
Bunguran Utara	Kelarik Utara	1	0	0	0	1	0	0	
	Kelarik	1	0	1	0	2	0	0	
	Kelarik Air Mali	1	0	0	0	1	0	0	
	Teluk Buton	2	0	0	0	1	0	0	TSEL Reg (menggunakan Tower TNI)
									TSEL USO reguler (ek BAKTI) OFF
	Belakang Gunung Durian	0	0	1	0	1	0	0	
Total		6	0	2	0	7	0	0	TSEL Reg “Teluk Buton” (menggunakan Tower TNI)

Kecamatan n	Kel/Desa	OPSEL				Layanan	POI	Repeater	Keterangan
		TSEL	Indosat	XL	Smartfren	4G			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Subi	Subi	1	1	0	0	1	0	0	TSEL USG reguler (ek BAKTI) di Teluk Buta “OFF”
	Subi besar	0	0	0	0	0	0	0	Indosat reg OFF
	Meliah	1	0	1	0	1	0	1	Repeater IPLH
	Terayak	0	0	0	0	0	0	0	
	Subi Besar Timur	0	0	0	0	0	0	0	
	Meliah Selatan	0	0	0	0	0	0	0	
Total		2	1	1	0	2	0	1	Indosat reg (di Subi) OFF & Repeater IPLH (di Subi Besar)
Pulau Laut	Tanjung Pala	1	1	0	0	2	0	0	
	Air Payang	1	0	0	0	1	0	0	
	Kadur	1	1	0	0	1	0	0	Indosat reg OFF
Total		3	2	0	0	4	0	0	Indosat reg (di Kadur) “OFF”
Pulau Tiga	Sabang Mawang	2	0	0	0	1	0	1	Repeater IPLH
	Sededap	1	0	0	0	1	0	0	
	Tanjung Batang	1	0	0	0	1	0	0	
	Serantas	1	0	0	0	1	0	0	
	Sabang Mawang Barat	1	0	0	0	1	0	0	
	Teluk Labuh	0	0	1	0	1	0	0	
Total		6	0	1	0	6	0	1	Repeater IPLH (di Sabang Mawang)
Bunguran Timur Laut	Tanjung	1	0	0	0	1	0	0	
	Ceruk	1	0	1	1	3	0	0	
	Kelanga	1	0	1	0	2	0	0	
	Pengadah	1	0	1	0	2	0	0	
	Sebadai Hulu	1	0	0	0	1	0	0	
	Limau Manis	0	1	1	0	1	0	0	Indosat reg OFF
	Selemam	0	0	1	0	1	0	0	
Total		5	1	5	1	11	0	0	Indosat reg (di Limau Manis) “OFF”

Kecamatan	Kel/Desa	OPSEL				Layanan		POI	Repeater	Keterangan
		TSEL	Indosat	XL	Smartfren	4G				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Bunguran Tengah	Harapan Jaya	1	0	1	0	2	0	0		
	Tapau	1	0	1	1	3	0	0		
	Air Lengit	2	0	1	1	3	0	0		Tsel USO BAKTI OFF
Total		4	0	3	2	8	0	0		Tsel USO BAKTI (di Air Lengit) "OFF"
Bunguran Selatan	Cemaga	1	0	0	1	2	0	0		
	Cemaga Selatan	2	0	0	1	3	0	0		
	Cemaga Utara	0	0	1	0	1	0	0		
	Cemaga Tengah	0	0	0	0	0	0	0		
Total		3	0	1	2	6	0	0		
Serasan Timur	Arung Ayam	0	0	0	0	0	0	0		
	Air Nusa	0	0	1	0	1	0	0		
	Air Ringau	1	0	0	0	1	0	0		
	Payak	1	0	1	0	1	0	0		
Total		2	0	2	0	3	0	0		
Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	0	0	0	0	0	0	0		
	Tg. Kumbik Utara	1	1	1	0	2	0	0		Indosat reg OFF
	Setumuk	0	0	0	0	0	0	0		
	Selading	1	1	0	0	2	0	0		
Total		2	2	1	0	4	0	0		Indosat reg (di Tg. Kumbik Utara) "OFF"
Suak Midai	Air Kumpai	2	0	0	0	2	0	0		
	Batu Belanak	1	0	0	0	1	0	0		
	Gunung Jambat	1	0	0	0	1	0	0		
Total		4	0	0	0	4	0	0		
Pulau Seluan	Seluan Barat	1	0	0	0	1	0	0		
	Kelarik Barat	0	0	1	0	1	0	0		
Total		1	0	1	0	2	0	0		
Pulau Panjang	Pulau Panjang	1	0	0	0	1	0	0		
	Pulau Kerdau	0	0	1	0	1	0	0		
Total		1	0	1	0	2	0	0		
Total se Kecamatan 2023		78	12	35	20	128	1	5		
Total Se Kecamatan 2022		73	12	32	20	125	1	5		

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2024)

j. PD (Perangkat Daerah) terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Dalam Optimalisasi Pelaksanaan layanan kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan bentuk nyata dengan menghubungkan beberapa Gedung OPD, Kecamatan, kelurahan, puskesmas diwilayah kabupaten Natuna melalui jaringan intranet dan internet untuk peningkatan kinerja pelayanan publik.

Berikut ini adalah ringkasan perkembangan pembangunan infrastruktur e-Government di Kabupaten Natuna oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, telah berhasil dilakukan pemasangan infrastruktur e-Government di 19 OPD/Kantor dalam jaringan intra Pemkab Natuna. Namun, pada tahun 2020, pembelanjaan infrastruktur tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, dengan bantuan Diskominfo Kabupaten Natuna, 3 OPD/Kantor berhasil melakukan penyambungan jaringan secara mandiri, dan ini berlanjut dengan penambahan 4 OPD/Kantor pada tahun berikutnya. Sehingga, hingga diakhir tahun 2021, jumlah OPD/Kantor yang terhubung dalam jaringan intra Pemkab Natuna mencapai 27. Pada tahun 2022, upaya penyediaan akses internet terintegrasi pada jaringan infrastruktur e-Government berlanjut, menghasilkan 20 titik akses

baru, sehingga totalnya menjadi 47 OPD di lingkungan Pemkab Natuna yang telah terpasang.

Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat melalui kegiatan penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berhasil mencakup 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dua kecamatan baru, Seluan dan Pulau Panjang telah ditambahkan, meningkatkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 49 namun 1 Kecamatan saja yang baru terpasang jaringan intra pemerintah . Dari jumlah tersebut, 12 OPD masih mengandalkan jaringan V-SAT, sedangkan sisanya telah terkoneksi ke jaringan intranet menggunakan infrastruktur ISP dan infrastruktur pemerintah daerah.

Ini merupakan suatu proses yang harus terus dijalankan sebagai penunjang efisiensi kerja perkantoran, terutama dalam menyediakan layanan akses internet hingga akhir tahun 2023. Ke depannya, diharapkan akan ada kelanjutan dalam hal pemeliharaan, pembelanjaan untuk akses internet, peralatan jaringan, serta melanjutkan proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan intranet. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akses internet di kantor/OPD yang belum memiliki instalasi, termasuk untuk OPD yang berpindah kantor atau yang mengalami masalah dalam jaringan mereka.

Tabel. 28 DATA OPD YANG TERSEDIA LAYANAN AKSES INTERNET/MASUK DALAM JARINGAN INTRA PEMKAB NATUNA, SERTA OPD YANG MENGELOLA DOMAIN DAN SUB DOMAINTAHUN 2024

N O	NAMA OPD	KETERSEDIAAN AKSES INTERNET	DOMAIN/SUB DOMAIN
1.	INSPEKTORAT	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://inspektorat.natunakab.go.id/
2.	SEKRETARIAT DPRD	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://setwan.natunakab.go.id/
3.	SEKRETARIAT DAERAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://setda.natunakab.go.id/
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dpupr.natunakab.go.id/
5.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://dpmpstsp.natunakab.go.id/

6.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dlh.natunakab.go.id/
7.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://dispورا.natunakab.go.id/
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://disdik.natunakab.go.id/

9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	http://disdukcapil.natunakab.go.id/
10.	DINAS SOSIAL	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://dinsos.natunakab.go.id/
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://diskominfo.natunakab.go.id/
12.	DINAS PARIWISATA	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	http://disperindagkopum.natunakab.go.id/
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://dpad.natunakab.go.id/
15.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://disdamkar.natunakab.go.id/
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dkpp.natunakab.go.id/
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dpmd.natunakab.go.id/
18.	DINAS PERHUBUNGAN	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://dishub.natunakab.go.id/
19.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	http://dp3ap2kb.natunakab.go.id/
20.	DINAS PERIKANAN	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	http://diskan.natunakab.go.id/
21.	DINAS KESEHATAN	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dinkes.natunakab.go.id/
22.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dprkpp.natunakab.go.id/
23.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	http://disnakertrans.natunakab.go.id/

24 .	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://kesbangpol.natunakab.go.id/
25 .	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://bpkad.natunakab.go.id/

26 .	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://bpbd.natunakab.go.id/
27 .	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://bpp.natunakab.go.id/
28 .	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://www.bp3d.natunakab.go.id/
29 .	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://bkpsdm.natunakab.go.id/
30 .	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
31 .	KECAMATAN PULAU LAUT		https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
32 .	KECAMATAN MIDAI		https://kecmidai.natunakab.go.id/
33 .	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI		https://kecbatubi.natunakab.go.id/
34 .	KECAMATAN SERASAN TIMUR		http://kecserasantimur.natunakab.go.id/
35 .	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://kecbungtengah.natunakab.go.id/
36 .	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT		https://kecpulautigabarat.natunakab.go.id/
37 .	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://kecbungbarat.natunakab.go.id/
38 .	KECAMATAN SUBI		https://kecsubi.natunakab.go.id/
39 .	KECAMATAN SELUAN		https://kecseluan.natunakab.go.id/

40 .	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	Jaringan Intra dengan Infras Pembkab Natuna	http://kecbungselatan.natunakab.go.id/
41 .	KECAMATAN SUAK MIDAI		https://kecsuakmidai.natunakab.go.id/
42 .	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	Jaringan Intra dengan Infras Pembkab Natuna	http://kecbungtimla.natunakab.go.id/
43 .	KECAMATAN SERASAN		https://kecserasan.natunakab.go.id/
44 .	KECAMATAN BUNGURAN UTARA		https://kecbungut.natunakab.go.id/
45 .	KECAMATAN PULAU TIGA		https://kecpulautiga.natunakab.go.id/
46 .	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	Jaringan Intra dengan Infras Pembkab Natuna	https://kecbungtim.natunakab.go.id/
47 .	KECAMATAN PULAU PANJANG		https://kecpulaupanjang.natunakab.go.id/

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2024)

k. Aplikasi Umum yang diimplementasikan Oleh Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika dimana disebutkan bahwa Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, pembangunan aplikasi umum ini tujuan agar masyarakat dan OPD serta penyelenggara pemerintahan lainnya di Kabupaten Natuna dapat memanfaatkan layanan pemerintah melalui Teknologi Informasi dan komunikasi.

Tabel 29 Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Aplikasi Umum Kabupaten Natuna

No	Jenis Aplikasi	Nama Aplikasi	OPD Pengguna	Kegunaan
1	Perencanaan	e-Planning	Semua OPD	Penyusunan Perencanaan Pembangunan

2	Penganggaran	iNFIS Anggaran	Semua OPD	Penyusunan Anggaran/RKA
3	Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Semua OPD	Pengadaan Barang dan Jasa
4	Kinerja	e-SAKIP	Semua OPD	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
5	Monitoring dan Evaluasi	e-MONEV	Semua OPD	Monitoring RKPD
6	Kearsipan	3. e-Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyimpanan Arsip
		4. Srikandi	Semua OPD	Penyimpanan Arsip
7	Kepegawaian	Sikekah	Semua OPD	Pencatatan Aktifitas/kinerja pegawai
8	Pengaduan	SP4N Lapor	Semua OPD dan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat
9	Data dan Informasi	Statistik	Semua OPD	Pengumpulan Data
10	Data dan Informasi	Sitante Eli	Semua OPD	Tandatangan elektronik
11	Data dan Informasi	Sipenting	Semua OPD	Sistem Elektronik Daerah Percepatan Penanganan Penurunan Stunting
12	Data dan Informasi	Sicantik	Semua OPD	sistem cloud untuk layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan
13	Perencanaan	SIPD Perencanaan	Semua OPD	Sistem Elektronik Perencanaan dan Keuangan
14	Keuangan	SIPD Penatausahaan	Semua OPD	Sistem Elektronik Perencanaan dan Keuangan

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2024)

I. Website Perangkat Daerah (termasuk desa)

Website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web (WWW) di Internet. Di era digital saat ini, internet merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan untuk memudahkan berbagai kegiatan.

Setiap orang dapat mengakses informasi terbaru dari manapun melalui website dengan menggunakan berbagai perangkat mulai smartphone, tablet, laptop hingga PC hanya dengan menggunakan koneksi internet. Website merupakan salah satu platform yang paling sering di akses untuk mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Terlebih saat ini sudah banyak aplikasi dan tutorial cara membuat website sendiri dari nol tanpa coding yang membuat proses pembuatan web semakin mudah dan pertumbuhan jumlah website selalu meningkat di

Indonesia.

Penyebaran informasi yang cepat, dan efisien inilah yang menjadi alasan utama mengapa website akan selalu menjadi sarana penting untuk mendapatkan dan mengelola informasi.

Sejauh ini perkembangan digitalisasi di Kabupaten Natuna, cukup berkembang dengan pesat. Berikut ini data Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan yang menggunakan Website Pemerintah Daerah.

Tabel 30 Data Website Pemerintah Kabupaten Natuna

1	PEMKAB NATUNA	https://natunakab.go.id/
2	INSPEKTORAT	https://inspektorat.natunakab.go.id/
3	SEKRETARIAT DAERAH	https://setda.natunakab.go.id/
4	SEKRETARIAT DPRD	https://setwan.natunakab.go.id/
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	https://disdamkar.natunakab.go.id/
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	https://dkpp.natunakab.go.id/
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	https://dpmd.natunakab.go.id/
8	DINAS PERHUBUNGAN	https://dishub.natunakab.go.id/
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	http://dp3ap2kb.natunakab.go.id/
10	DINAS PERIKANAN	http://diskan.natunakab.go.id/
11	DINAS KESEHATAN	https://dinkes.natunakab.go.id/
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	https://dprkpp.natunakab.go.id/
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	http://disnakertrans.natunakab.go.id/
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	https://dpupr.natunakab.go.id/
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	http://dkp.natunakab.go.id/
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	https://dpmpstsp.natunakab.go.id/
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	https://dlh.natunakab.go.id/
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	https://dispورا.natunakab.go.id/
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	https://disdik.natunakab.go.id/
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	http://disdukcapil.natunakab.go.id/
21	DINAS SOSIAL	https://dinsos.natunakab.go.id/
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	https://diskominfo.natunakab.go.id/
23	DINAS PARIWISATA	https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	http://disperindagkopum.natunakab.go.id/

25	DINAS PERTANIAN	http://distan.natunakab.go.id/
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	https://dpad.natunakab.go.id/
27	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	https://bpp.natunakab.go.id/
28	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	https://www.bp3d.natunakab.go.id/
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	https://bkpsdm.natunakab.go.id/
30	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	https://bp2rd.natunakab.go.id/
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	http://kesbangpol.natunakab.go.id/
32	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	http://bpkad.natunakab.go.id/
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	https://bpbdd.natunakab.go.id/
34	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	http://kecbungselatan.natunakab.go.id/
35	KECAMATAN SUAK MIDAI	https://kecsuakmidai.natunakab.go.id/
36	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	http://kecbungtimla.natunakab.go.id/
37	KECAMATAN SERASAN	https://kecserasan.natunakab.go.id/
38	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	https://kecbungut.natunakab.go.id/
39	KECAMATAN PULAU TIGA	https://kecpulautiga.natunakab.go.id/
40	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	https://kecbungtim.natunakab.go.id/
41	KECAMATAN PULAU PANJANG	https://kecpulaupanjang.natunakab.go.id/
42	KECAMATAN PULAU LAUT	https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
43	KECAMATAN MIDAI	https://kecmidai.natunakab.go.id/
44	KECAMATAN SERASAN TIMUR	http://kecserasantimur.natunakab.go.id/
45	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	http://kecbungtengah.natunakab.go.id/
46	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT	https://kecpulautigabarat.natunakab.go.id/
47	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	https://kecbungbarat.natunakab.go.id/
48	KECAMATAN SUBI	https://kecsubi.natunakab.go.id/
49	KECAMATAN SELUAN	https://kecseluan.natunakab.go.id/
50	Unit Layanan Pengadaan	http://ulp.natunakab.go.id/
51	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	http://rsud.natunakab.go.id/
52	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	http://lpse.natunakab.go.id/eproc4
53	JDIH	http://jdih.natunakab.go.id/
54	SATPOL PP	http://polpp.natunakab.go.id/
55	SIPETARUNG	http://sipetarung.natunakab.go.id/
56	STATISTIK	http://satudata.natunakab.go.id/
57	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG & JASA	https://ukpbj.natunakab.go.id/
58	Desa Teluk Labuh	https://teluklabuh.website.desa.id/

59	Desa Teluk Buton	https://telukbuton.desa.natunakab.go.id/
60	Desa Tapau	https://tapau.desa.natunakab.go.id/
61	Desa Tanjung Kumbik Utara	https://tanjungkumbikutara.desa.natunakab.go.id/
62	Desa Tanjung Batang	https://tanjungbatang.desa.natunakab.go.id/
63	Desa Tanjung Balau	https://tanjungbalau.desa.natunakab.go.id/
64	Desa Setumuk	https://setumuk.desa.natunakab.go.id/
65	Desa Selemam	https://selemam.desa.natunakab.go.id/
66	Desa Selaut	https://selaut.desa.natunakab.go.id/
67	Desa Selading	https://selading.desa.natunakab.go.id/
68	Kelurahan Sedanau	https://sedanau.website.desa.id/
69	Desa Sebadai Ulu	https://sebadaihulu.desa.natunakab.go.id/
70	Desa Sabang Mawang Barat	https://sabangmawangbarat.desa.natunakab.go.id/
71	Desa Sabang Mawang	https://sabangmawang.website.desa.id/
72	Kelurahan Ranai Kota	https://ranaikota.natunakab.go.id/
73	Desa Payak	https://payak.website.desa.id/
74	Desa Pangkalan	https://pangkalan.website.desa.id/
75	Desa Limau Manis	https://limaumanis-natuna.desa.id/
76	Desa Kelanga	https://kelanga.desa.natunakab.go.id/
77	Desa Gunung Putri	https://gunungputri.website.desa.id/
78	Desa Gunung Jambat	https://gunungjambat.desa.natunakab.go.id/
79	Desa Tanjung Setelung	https://desatanjungsetelung.natunakab.go.id/
80	Desa Tanjung Pala	https://desatanjungpala.natunakab.go.id/
81	Desa Tanjung	https://desatanjung.natunakab.go.id/
82	Desa Subi Besar Timur	https://desasubibesartimur.natunakab.go.id/
83	Desa Subi Besar	https://desasubibesar.natunakab.go.id/
84	Desa Sepempang	https://desasepempang.natunakab.go.id/
85	Desa Semedang	https://desasemedang.natunakab.go.id/
86	Desa Seluan Barat	https://desaseluanbarat.natunakab.go.id/
87	Desa Sededap	https://desasededap.natunakab.go.id/

88	Desa Pulau Tiga	https://desapulautiga.natunakab.go.id/
89	Desa Pulau Kerdau	https://desapulaukerdau.natunakab.go.id/
90	Desa Pengadah	https://desapengadah.natunakab.go.id/
91	Desa Meliah Selatan	https://desameliahselatan.natunakab.go.id/
92	Desa Mekar Jaya	https://desamekarjaya.natunakab.go.id/
93	Desa Kelarik Barat	https://desakelarikbarat.natunakab.go.id/
94	Desa Kelarik Air Mali	https://desakelarikairmali.natunakab.go.id/
95	Desa Kampung Hilir	https://desakampunghilir.natunakab.go.id/
96	Desa Harapan Jaya	https://desaharapanjaya.natunakab.go.id/
97	Desa Ceruk	https://desaceruk.natunakab.go.id/
98	Desa Cemaga Utara	https://desacemagautara.natunakab.go.id/
99	Desa Cemaga Selatan	https://desacemagaselatan.natunakab.go.id/
100	Desa Binjai	https://desabinjai.natunakab.go.id/
101	Desa Arung Ayam	https://desaarungayam.natunakab.go.id/
102	Desa Air Ringau	https://desaairringau.natunakab.go.id/
103	Desa Air Payang	https://desaairpayang.natunakab.go.id/
104	Desa Air Kumpai	https://desaairkumpai.natunakab.go.id/

105	Desa Cemaga	https://cemaga.website.desa.id/
106	Desa Batu Gajah	https://batugajah.website.desa.id/
107	Desa Batu Berian	https://batuberian.desa.natunakab.go.id/
108	Desa Air Nusa	https://airnusa.website.desa.id/
109	Desa Air Lengit	https://airlengit.desa.natunakab.go.id/
110	Desa Pulau Panjang	http://desapulaupanjang.natunakab.go.id/
111	Desa Kelarik	http://desakelarik.natunakab.go.id/
112	Desa Kadur	http://desakadur.natunakab.go.id/
113	Desa Gunung Durian	http://desagunungdurian.natunakab.go.id/
114	Desa Cemaga Tengah	http://desacemagatengah.natunakab.go.id/
115	PUSKESMAS KELARIK	http://puskesmas-kelarik.natunakab.go.id/
116	PUSKESMAS RANAI	http://puskesmasranai.natunakab.go.id/
117	PUSKESMAS SERASAN TIMUR	http://puskesmasserasantimur.natunakab.go.id/
118	Badan Amil Zakat Nasional	http://baznas.natunakab.go.id/
119	DEKRANASDA	http://dekranasda.natunakab.go.id/
120	INFORMASI LAYAK ANAK	http://ila.natunakab.go.id/
121	LAPOR	http://lapor.natunakab.go.id/

Sumber: Bidang e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna

Pada Tujuan selanjutnya menyasar pada Indikator Kinerja Utama pada poin kedua dapat dicermati dalam tabel berikut ini :

Tabel 31 Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Kedua Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi dan Komunikasi	53	Meningkatnya publikasi informasi dan komunikasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	80

Berdasarkan tabel yang disajikan, ada hubungan erat dengan misi ketujuh Kepala daerah, dimana tujuan ini akan menjadi tujuan yang akan dicapai bagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Misi tersebut bertujuan untuk "Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital di Semua Sektor", dengan indikator "Nilai Keterbukaan Informasi Publik" yang menjadi tujuan diskominfo kabupaten natuna untuk "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah". Semua tujuan tersebut bisa tercapai melalui manajemen yang baik dalam penerapan e-government, yang memerlukan dukungan dari fasilitas jaringan intranet dan internet di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, serta pengelolaan data yang aman, akurat, dan unggul dalam pengamanan informasi berbasis elektronik.

2. Sasaran Strategis IKU 2 “Meningkatnya publikasi informasi dan komunikasi publik”

Dengan indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, yaitu:
Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 32 Indikator Kinerja Utama 2 & Formulasi Perhitungannya Dalam Pencapaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Keterangan
2.	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	$\frac{\text{Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui Berbagai Media}}{\text{Target Informasi}} \times 100\%$	Cakupan Informasi : A. Berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan Target Informasi B. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia 17 Tahun Keatas

Tabel 33 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET 2024	REALISASI	Capaian 2023(%)
2	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai Media	%	70	80	100	125

2.1. Berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan 2.1.1

Berdasarkan jumlah Berita yang dipublikasikan Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan kerjasama ada 75 Media terdiri dari cetak dan media online dan pemberitaan dari jurnalis Kominfo yang membuat 608 berita yang diupload dalam website www.natunakab.go.id berjumlah 547 dan www.diskominfo.natunakab.go.id, berjumlah 61 di Tahun 2024. Pembuatan dan penyusunan berita oleh tim jurnalis dengan rincian Publikasi Media Sosial adalah 650 Berita dan Publikasi melalui Website adalah 608 Berita. Sedangkan Untuk Jumlah pengunjung Website dapat dilihat Pada Tabel dibawah ini.

Tabel 34 Rekapitulasi Data dan perbandingan Kunjungan Website

Website : natunakab.go.id

Tahun : 2024

No	Bulan	Jumlah Visitor			Jumlah Page View		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Januari	3.942	1.170	1.723	4.738	1.480	2.447
2	Februari	5.113	1.339	1.352	5.992	1.666	2.358
3	Maret	11.587	1.599	1.237	12.849	2.015	3.407
4	April	6.583	871	1.109	7.571	1.078	3.441
5	Mei	4.690	1.209	1.589	5.385	1.468	3.994
6	Juni	6.353	1.185	1.184	7.272	1.542	3.086
7	Juli	4.262	1.376	1.228	4.758	1.671	2.349
8	Agustus	3.900	1.751	1.418	4.407	2.081	3.312
9	September	4.391	1.946	1.187	5.015	2.483	2.590
10	Oktober	4.332	1.921	1.220	4.972	2.284	2.707
11	November	2.695	1.584	8.466	3.124	2.021	2.377
12	Desember	1.140	1.752	20.007	1.398	2.164	994
Total		58.988	17.703	41.720	67.481	21.953	33.062



www.diskominfo.natunakab.go.id

www.facebook.com/diskominfo.natunakab

www.threads.net/@kominfoNatuna



www.youtube.com/@kominfoNatuna



www.twitter.com/kominfoNatuna



www.instagram.com/kominfoNatuna

diskominfo@natunakab.go.id

Laporan Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna

www.diskominfo.natunakab.go.id

Website : diskominfo.natunakab.go.id Tahun : 2024

No	Bulan	Jumlah Visitor		Jumlah Page View	
		2023	2024	2023	2024
1	Januari	1.219	3.817	1.549	4.536
2	Februari	2.158	3.421	2.734	4.038
3	Maret	2.120	3.691	2.534	5.135
4	April	1.590	4.110	1.820	4.842
5	Mei	1.635	5.098	2.093	6.023
6	Juni	1.340	3.845	1.515	4.550
7	Juli	1.981	3.244	2.252	3.979
8	Agustus	2.401	4.147	2.735	5.198
9	September	2.626	3.445	2.994	4.184
10	Oktober	2.615	3.581	2.990	4.214
11	November	2.515	10.439	2.946	13.152
12	Desember	2.353	20.857	2.693	25.372
Total		36.644	70.02	28.855	85.223

Jenis media komunikasi berdasarkan bentuk penyampaiannya dapat dibedakan menjadi :

1. Media Cetak (Baleho, spanduk)
2. Media Audio (radio)
3. Media Visual (gambar atau foto)
4. Media Audio Visual (ada unsur gambar dan suara)

Jenis media komunikasi berdasarkan teknologi dibedakan menjadi :

1. Media Komunikasi Konvensional (Media Komunikasi Massa)
 - ✓ Media Cetak (Baleho, Spanduk)
 - ✓ Media Penyiaran (radio, televisi)
 - ✓ Media Audio Visual Online (Youtube, Tiktok)
2. Media Website (www.natunakab.go.id dan www.diskominfo.natunakab.go.id)
3. Media Sosial (treats, Instagram, facebook, X)

Untuk Media audio pelaksanaan dialog interaktif kancah opini pagi hari (Kopi Pagi) dalam studio tahun 2024 terlaksana adalah 8 kali dari 20 kali target penyiaran yang dilaksanakan bertempat di Auditorium Stasiun RRI.

Dalam mendiseminasikan program-program pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah menyalurkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media online (website), media sosial (facebook, twitter, instagram, dan treats dan X (tweeter)), media Audio (kerjasa sama dengan RRI) pada kegiatan Pengelolaan aspirasi dan opini publik dalam acara Kancan Opini Pagi disebut “Kopi Pagi” khusus Ngobrol bareng kominfo (NBK) tahun 2024 tidak dapat berjalan dikarenakan pergeseran anggaran dimana kegiatan (NBK) ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap topik yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat melalui media sosial (viral) sehingga informasi yang didapat akhirnya menjadi jelas fakta dan datanya dan bukan informasi hoax.

Berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan Media visual dan audio bisa diakses melalui <https://www.youtube.com/@DiskominfoNatuna> untuk kegiatan pelayanan informasi publik telah Melaksanakan fungsi PPID dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor) telah dilaksanakan dengan regulasi SP4N Lapor dan PPID terlaksana Pada Tahun 2024 ini.

Tabel 35
Rekapitulasi Berita/Informasi Per Triwulan Tahun 2024

PENULIS	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TOTAL
	Berita	Berita	Berita	Berita	
Tim Diskominfo					
Publikasi Melalui Media Sosial	540	432	552	152	1.676
Publikasi Melalui Website	151	163	248	65	627
Jumlah berita yang Dipublikasikan	691	595	800	217	2.303

Tabel 36
Perbandingan Jumlah Berita Tahun 2022 s/d 2024

PENULIS	2022	2023	2024
Tim Diskominfo	636	1.222	1.676
Publikasi Melalui Media Sosial	539	614	2.095
Publikasi Melalui Website	197	608	627

2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 17 tahun Keatas

Data ini merupakan pembagian dari Formulasi perhitungan untuk mengukur Indikator Kinerja untuk mendapatkan persentase Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik.

Tabel 37

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN KTP DAN
KECAMATAN
KABUPATEN NATUNA**

KECAMATAN	REKAM	BELUM REKAM	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
MIDAI	2,608	89	2,697
BUNGURAN BARAT	5,465	315	5,780
S E R A S A N	3,751	161	3,912
BUNGURAN TIMUR	18,125	816	18,941
BUNGURAN UTARA	2,820	119	2,939
SUBI	1,630	34	1,664
PULAU LAUT	1,658	59	1,717
PULAU TIGA	2,531	180	2,711
BUNGURAN TIMUR LAUT	3,793	156	3,949
BUNGURAN TENGAH	2,594	140	2,734
BUNGURAN SELATAN	2,282	128	2,410
SERASAN TIMUR	2,382	83	2,465
BUNGURAN BATUBI	2,761	164	2,925
PULAU TIGA BARAT	1,531	75	1,606
SUAK MIDAI	1,335	54	1,389
PULAU PANJANG	590	26	616
PULAU SELUAN	566	45	611
TOTAL SE KABUPATEN 2022	56,422	2,644	59,066

Selanjutnya menyasar Indikator Kinerja Utama ke tiga, yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral pemerintah daerah merupakan satu dari lima tujuan RPJMD yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adapun indikator tujuan yang ingin dicapai adalah persentase release data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan Pasal 36, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Pasal 4, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, menyebutkan bahwa penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagai Walidata Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengajukan permohonan fasilitasi instalasi Portal SDI untuk mendukung proses



penyebarluasan Data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna ke pemerintah pusat.

Tabel 38 Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Ketiga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan 2024	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2024
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral pemerintah daerah	Persentase release data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu	60%	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persentase ketersediaan data statistic sektoral yang terupdate	65%

5. **Sasaran Strategis IKU 3 “Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas”.**

Dengan indikator kinerja sasaran yaitu: **Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate.** Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 39
Indikator Kinerja Utama 3 & Formulasi Perhitungannya
Dalam Pencapaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Keterangan
3.	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	$\frac{\text{Data Statistik sektoral yang terupdate}}{\text{Target Data Statistik}} \times 100\%$	Data Statistik Sektoral yang ter Update

Tabel 40
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (2021)	TARGET 2024	REALISASI 2024	Capaian(%)
-----	---------	-------------------	--------	---------------------	-------------	----------------	------------

3.	Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral yang Berkualitas	Presentase Ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate	%	53	65	100,36	154,40%
----	--	--	---	----	----	--------	---------

Dalam rangka mewujudkan kebutuhan data dan informasi statistik yang berkualitas, masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu.

Maksud : untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data yang secara sistematis dan efisien

Tujuan : untuk memberikan informasi berupa data bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempergunakan Data Statistik Kabupaten Natuna untuk masing-masing keperluan.

Beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah menyebabkan ketersediaan data yang tidak lengkap dan akurat adalah:

- Masih kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya data.
- Masih Kurangnya Kelengkapan Data.
- Masih kurangnya koordinasi antar OPD.
- Kualitas data belum terjamin.
- Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan data sektoral.
- Kurangnya SDM yang mumpuni.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah. Adapun pencapaian kinerja dihasilkan adalah :

1. buku (Informasi Data Kabupaten Natuna) yang telah berjalan 2022-2023.
2. Website <https://satudata.natunakab.go.id/> dan <https://statistik.natunakab.go.id/>

Selain itu, hasil dari survei yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam pengumpulan data dan informasi statistik. Sebanyak 276 data berhasil terkumpul dari target sebanyak 275 data yang ditetapkan, yang berasal dari 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercatat. Selain upaya pengumpulan data, proses pembaruan ketersediaan data statistik sektoral juga dilakukan setiap tahun. Pada tahun ini, terdapat peningkatan dalam jumlah data yang disajikan, dengan metode pengumpulan, validasi, dan sinkronisasi data yang dilakukan bersama produsen data (OPD terkait). Hasilnya telah dipublikasikan melalui website resmi <https://satudata.natunakab.go.id/>. Sebelumnya, telah dibuat domain lain dengan

alamat <https://statistik.natunakab.go.id/> untuk memfasilitasi akses data bagi pihak yang berkepentingan dan dihasilkan juga buku (Informasi Data Kabupaten Natuna) Buku ini berisi tentang data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna oleh Setiap OPD dari hasil pendataan yang telah dilakukan

6. Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah”

Dengan indikator kinerja sasaran Yaitu: **Predikat/Nilai Akuntabilitas**

Pada tahun 2023 laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memperoleh Predikat BB dengan nilai 75,25 Nilai ini sesuai dengan Hasil Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika No : 700.1.2.1/IRBAN I/LHE/293/V/2023. sedangkan Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Natuna memperoleh Predikat BB dengan Nilai 74,55 mengalami Kenaikan sekitar 99.07%. Perhitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata- rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori capaian sebagai berikut :

Tabel 41 Kategori Capaian Kinerja

No.	Kategori	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30- 50	Agak Kurang
7	D	0-30	Kurang

Untuk tahun 2024, belum tersedia laporan evaluasi mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Natuna karena laporan tersebut baru akan dirilis pada Maret tahun depan. Evaluasi ini mencakup lima aspek utama manajemen kinerja, yakni: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan hasil kinerja.



Sementara itu, evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk tahun 2022 mencakup empat aspek utama, yaitu: 1. Perencanaan Kinerja, 2. Pengukuran Kinerja, 3. Pelaporan Kinerja, dan 4. Evaluasi Internal, yang semuanya telah dilakukan. Informasi mengenai nilai hasil evaluasi tersebut beserta perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 42 Hasil Evaluasi Manajemen Kinerja

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Strategis	10	-	8,78	-	-	
2	Perencanaan Kinerja	30	24,20	18,50	24,00	22,80	
3	Pengukuran Kinerja	25	17,50	20,00	22,20	22,80	
4	Pelaporan Kinerja	15	10,60	12,23	12,60	11,40	
5	Evaluasi Internal	10	7,1	6,89	15,75	18,2	
6	Capaian Kinerja	20	15,00	13,75	-	-	
Total Nilai Komponen Kinerja		100	74,47	81,01	74,55	75,25	

Tabel 43**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024**

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Lakip	Predikat/ Nilai Lakip	A/81,35	BB/75,25	92,50 %

Tabel 44 Target dan Realisasi Indikator SasaranPredikat/Nilai LAKIP Tahun 2024

Indikator Kinerja	2024		Capaian terhadap Target Akhir Renstra (A/80,35)
	Target (%)	Realisasi (%)	
Predikat/Nilai LAKIP	A/81,35	BB/75,25	92,50 %

Dari hasil evaluasi saran/rekomendasi yang diberikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berupaya agar tingkat implementasi SAKIP terus

meningkat dan selaras dengan target RPJMD serta perbaikan dengan melakukan reviu pada cara penghitungan indikator kinerja utama, dan pada akhir tahun 2024 peningkatan daya guna laporan kinerja akan melakukan pengembangan kualitas implementasi AKIP dengan memperhatikan rekomendasi perbaikan dengan menselaraskan dan berintegrasi dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna program dan kegiatan diakhir tahun Renstra disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan pembaruan yang ada.

7. Sasaran Strategis 5 “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima”

Dengan indikator kinerja sasaran Yaitu: **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Merupakan Upaya untuk mendapatkan informasi yang dapat menggambarkan kondisi kepuasan masyarakat atas layanan publik dari perangkat daerah terkait, Dalam prosesnya dibutuhkan data yang valid, lengkap dan Up to date berkaitan dengan akses penggunaan layanan dalam mendukung kebutuhan masyarakat

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan public, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka dari itu tujuan di laksanakan survey kepuasan masyarakat ini adalah :

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam bentuk nilai indeks kepuasan Masyarakat.
2. Mengetahui kinerja Dinas secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public selanjutnya.

Pelaksanaan survey dilakukan dengan Teknik kuesioner yang disebarkan melalui pesan singkat whatapp keberbagai group dan pribadi penerima layanan yang diisi sebanyak 85 responden penerima layanan, Pertanyaan kuesioner meliputi 9 variabel unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, prosedur
3. Waktu Penyelesaian

4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku pelaksanaan
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.

Adapun untuk melihat nilai persepsi, nilai internal, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 45 Nilai Persepsi, nilai interval, nilai interval koversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Diskominfo

Berdasarkan profil kuesioner yang telah terkumpul, responden yang mengisi kuesiner dapat dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

1. Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 6 Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



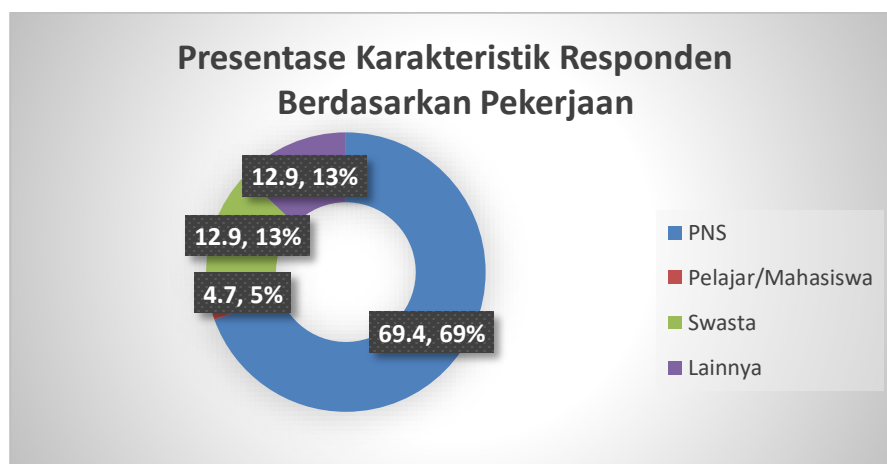
2. Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan

Grafik 7 Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan



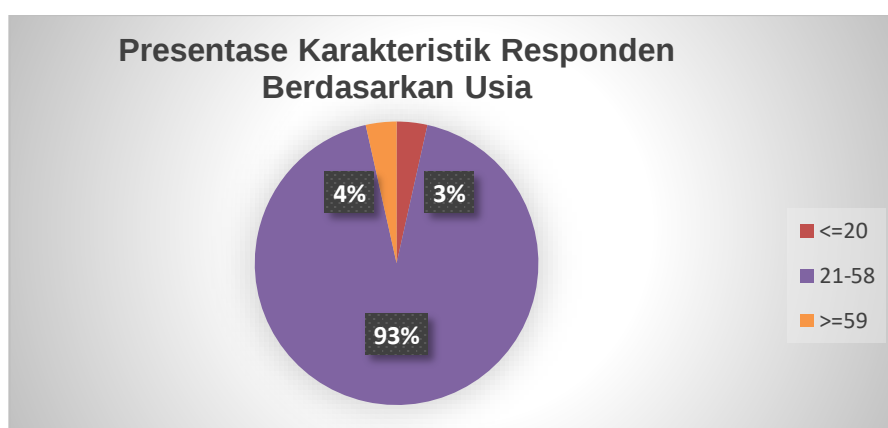
3. Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan

Grafik 8 Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



4. Karakteristik Berdasarkan Usia

Grafik 9 Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, Jumlah Nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,111, maka dari itu dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,41 atau 85,38. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam kategori mutu pelayanan Baik dimana masuk dalam kategori B (nilai Interval 3,0644– 3,532).

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Untuk Tahun 2024 yang dilihat dari Hasil pencapaian indikator seluruh sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 46 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian 2024 (%)
			Target	Realisai	
Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi					
1	Persentase peningkatan teknologi informasi dan komunikasi	%	70,36	76	108,02
Sasaran 2 : Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik					
2	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	%	80	100	125
Sasaran 3 : Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas					
3	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate	%	65	100,36	154,40
Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah					
4	Nilai LAKIP	Nilai/ Predikat	A/81,35	BB/75,25	92,50
Sasaran 5 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat					
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,47	3,41	97,99

- i. **Menetapkan target (Tujuan, Sasaran dan Program dalam Perencanaan Kinerja agar dapat dicapai (achievable), secara menantang dan realistis.**

Dalam menanggapi rekomendasi ketiga ini, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya mewujudkannya dengan menyusun yang terdapat dalam rencana strategis Diskominfo untuk Tahun 2024, yang mencakup penentuan target (Tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi berlandaskan Nilai Religius dan Kultural

Misi : 6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)

7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk merealisasikan misi 6 dan 7, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dituangkan kedalam Tujuan RPJMD yang dijadikan sebagai acuan dalam mengukur pencapaian kinerja organisasi, yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 47 Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran Misi Rencana Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Natuna

Tujuan Misi	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Target
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	63
Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi semua sektor	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan	Persen	68

Berdasarkan tabel tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran misi sebagai tujuan organisasi dalam penyusunan program dan kegiatan apasaja yang akan direncanakan dan dilaksanakan, Sebelum memulai pelaksanaan program dan kegiatan, ini dikategorikan berdasarkan Bidang Pemerintahan yang mencakup :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Kemudian Penetapan Untuk Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel II.1 di BAB II Laporan ini,

Tabel 48 Keterkaitan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Pengadaan Mebel
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		5 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



www.diskominfo.natunakab.go.id



www.youtube.com/@kominfonatuna



www.twitter.com/kominfonatuna

diskominfo@natunakab.go.id



www.instagram.com/kominfonatuna

Laporan Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna

www.diskominfo.natunakab.go.id

				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/kota	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
				2	Monitoring Informasi dan penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
				3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				4	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Pendaftaran nama Domain Pemerintah Kabupaten
				2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		2	Pengelolaan E-Government Dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
				3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
		3	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK					



www.diskominfo.natunakab.go.id

www.facebook.com/diskominfo.natunakab

www.threads.net/@kominfoNatuna



www.youtube.com/@kominfoNatuna



www.twitter.com/kominfoNatuna



www.instagram.com/kominfoNatuna

diskominfo@natunakab.go.id

Laporan Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna

www.diskominfo.natunakab.go.id

1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik sektoral
				2	Membangun Metadata Statistik Sektoral

Berikut ini adalah pencapaian dan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah, yang telah dijabarkan menjadi tujuan strategis dalam rencana strategis (Renstra). Tujuan ini diarahkan untuk mencapai target akhir Renstra, sehingga dapat diukur hasilnya setiap tahun. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 49 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2024 Terhadap Target Akhir Renstra serta capaian kinerja renstra (%) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada Tahun 2024

No	Tujuan Kinerja	Sasaran Kinerja	Capaian Kinerja Tahun Ke -				Target Akhir Renstra	Realisasi Renstra Tahun 2024	Keterangan
			2021	2022	2023	2024			
1	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi	129,51%	138,48%	118,69%	120,33	77.04%	76,00%	
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Meningkatnya publikasi informasi dan komunikasi publik	116,66%	217,81	130,67%	129,45	90%	100%	
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan data statistik	100%	154,75%	130,72%	116.67	75%	100,36%	

		sektoral yang berkualitas							
4	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	A/81,01	BB/74,55	BB/75,25	0	A/81,45	BB/75,25	
5	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	0	3,00	3,292	24,225	3,50	24,225	



www.diskominfo.natunakab.go.id

www.facebook.com/diskominfo.natunakab

www.threads.net/@kominfonatuna



www.youtube.com/@kominfonatuna



www.twitter.com/kominfonatuna



www.instagram.com/kominfonatuna

diskominfo@natunakab.go.id

3.1.4 Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada laporan kinerja.

Dalam Hal ini untuk penyampaian perbandingan Realisasi Kinerja dengan target menengah pada Dinas Komunikasi dan informatika telah tertuang pada perjanjian kinerja serta dalam realisasi kinerjajanga dapat diukur dan disajikan dalam dokumen pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan informatika dimana penyajian data secara rinci akan di tampilkan pada grafik perbandingan berikut ini :

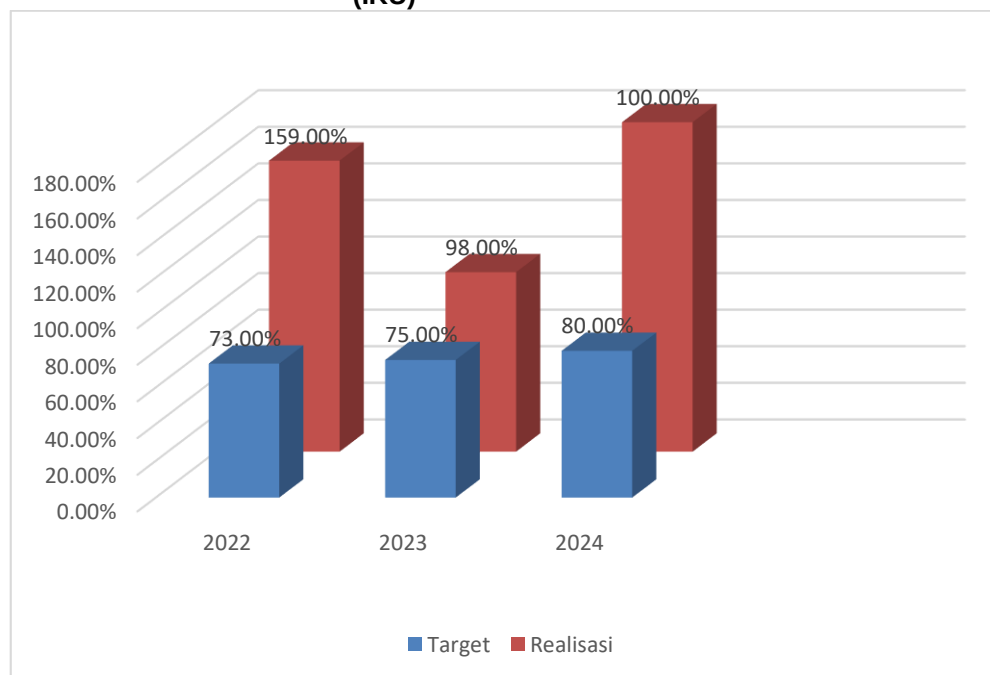
1. Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra yang dijadikan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 s/d 2024

- a. Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Grafik 10
Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra
Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKU)

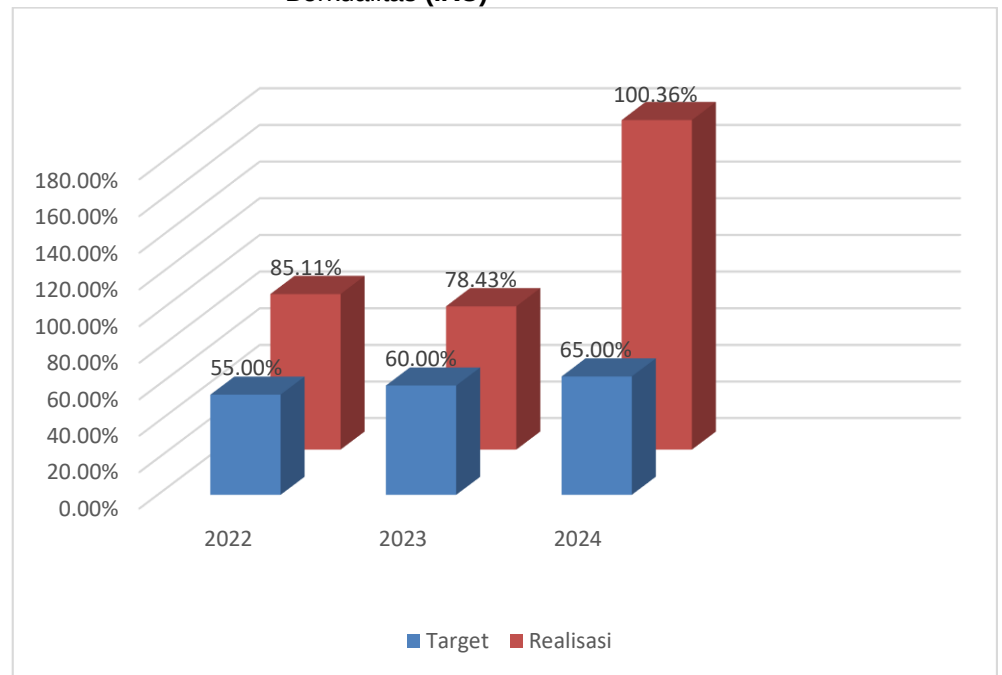
- b. Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik

Grafik 11
Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra
Meningkatnya Publikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKU)



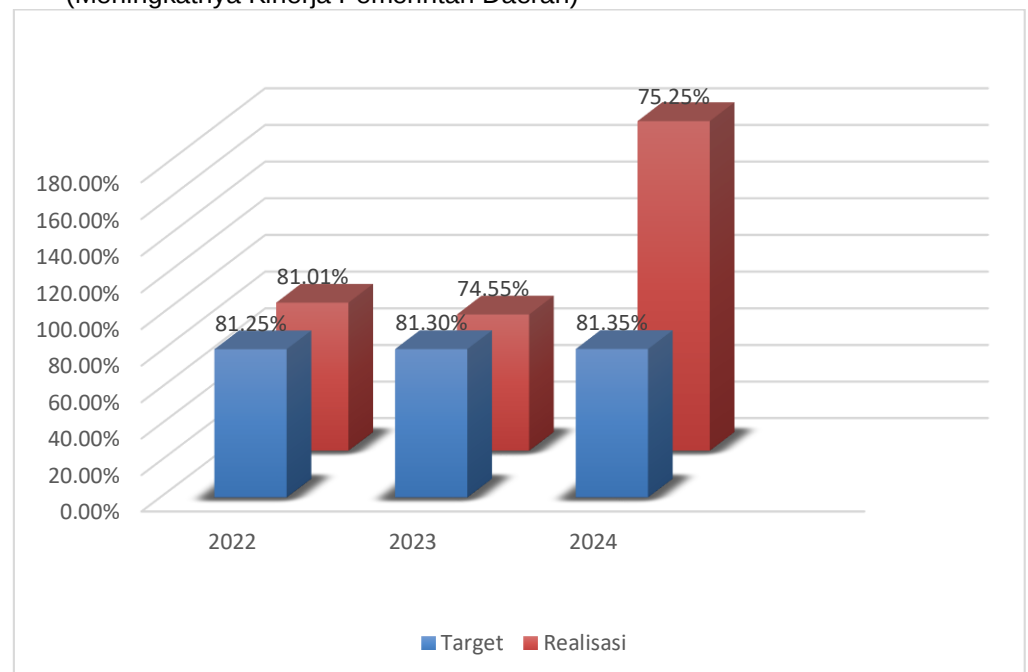
- c. Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas

Grafik 12
Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra
 Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor yang Berkualitas (IKU)



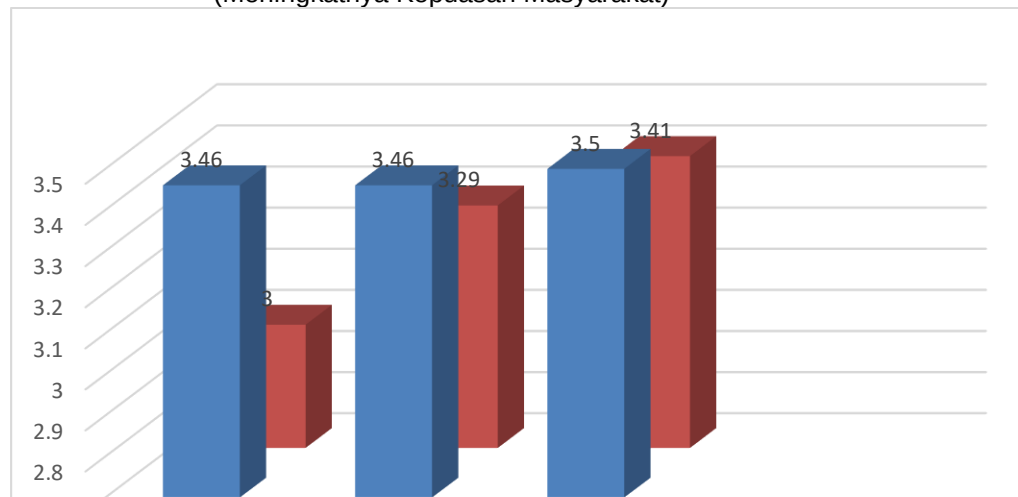
2. Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2022 s/d 2024

Grafik 13
Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra
 (Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah)



3. Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022 s/d 2024

Grafik 14
Perbandingan Realisasi Tujuan Renstra
(Meningkatnya Kepuasan Masyarakat)



www.diskominfo.natunakab.go.id



www.facebook.com/diskominfo.natunakab

www.threads.net/@kominfoNatuna



www.youtube.com/@kominfoNatuna



www.twitter.com/kominfoNatuna



www.instagram.com/kominfoNatuna

diskominfo@natunakab.go.id

Laporan Kinerja Tahun 2024

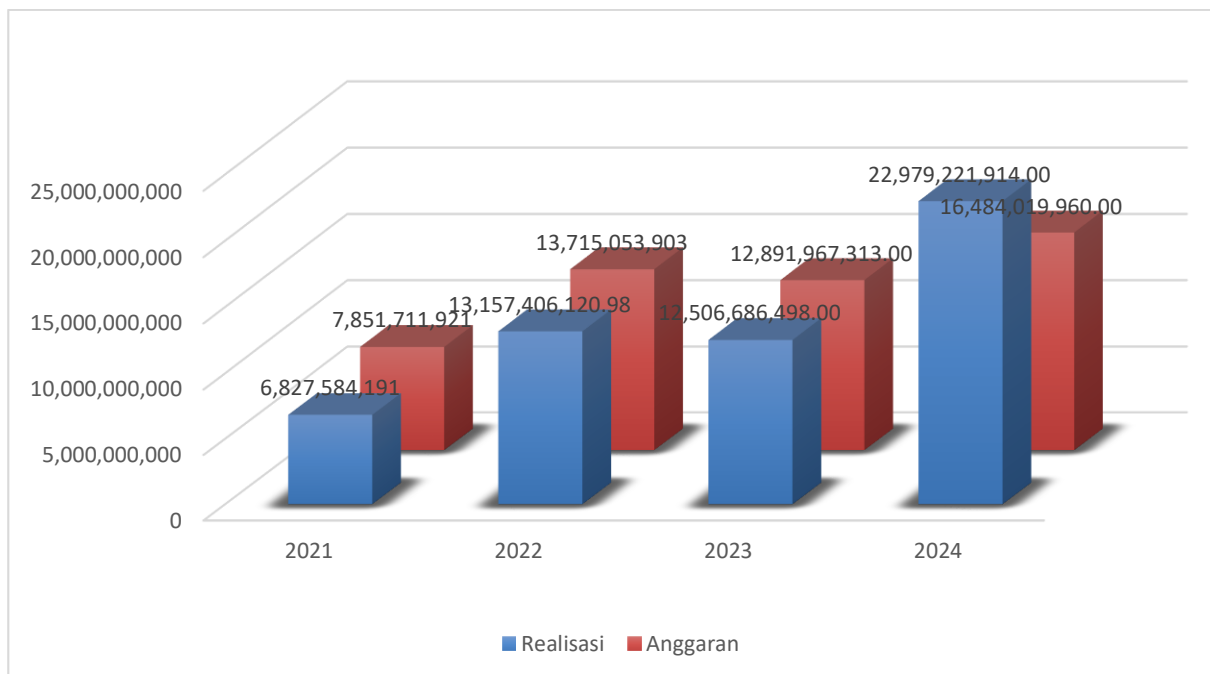
www.diskominfo.natunakab.go.id

II.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Halaman / 87

Realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp16.484.019.960,00 atau 71,73% dari Pagu DPPA sebesar Rp22.979.221.914,00. Adapun di Tahun 2024, persentase realisasi ini mengalami Kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 31,80% dan untuk anggarannya juga mengalami Kenaikan sebesar 178.24%.

Grafik 15
Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
s/d 2024
Anggaran & Realisasi Belanja Langsung



Jumlah anggaran belanja Daerah tahun 2024 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) murni sebesar Rp.15.235.977.427,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.12.260.787.627,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.2.940.009.800,00, setelah perubahan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) sebesar Rp.22.979.221.914,00 terdiri dari Belanja Operasi



www.diskominfo.natunakab.go.id

www.facebook.com/diskominfo.natunakab

www.threads.net/@kominfoNatuna



www.youtube.com/@kominfoNatuna



www.twitter.com/kominfoNatuna



www.instagram.com/kominfoNatuna

diskominfo@natunakab.go.id

Laporan Kinerja Tahun 2024

www.diskominfo.natunakab.go.id

sebesar Rp.6.495.201.954,00. Besarnya anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan Dana Tranfer dari Pusat ke Bendahara Umum Daerah tidak Terpenuhi dan mengakibatkan belanja yang seharusnya dibayarkan tidak terealisasi sepenuhnya.

Halaman / 88

Hampir semua kegiatan dapat melebihi target kinerja yang diperjanjikan. Realisasi anggaran dan realisasi belanja Daerah tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan pendukung untuk mendukung pencapaian IKU disajikan pada tabel dibawah ini. Dari 3 indikator sasaran IKU, seluruh pencapaian kinerja yang lebih dari 100% telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

Untuk realisasi indikator kinerja dan Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 50 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggara		
			Satuan	Target	Realisa	%	Target (Rp)	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi	%	70.361	76,00	108,02	3.955.355.132	1.227.154.631	31,03
		JUMLAH				108,02	3.955.355.132	1.227.154.631	31,03
2	Meningkatnya publikasi informasi dan komunikasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	%	80	100,00	125,00	12.444.258.100	9..644.295.594	77,50
		JUMLAH				125,00	12.444.258.100	9.644.295.594	77,50
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate	%	65	100,36	154,40	165.402.020	79.101.414	47,82
		JUMLAH				154,40	165.402.020	79.101.414	47,82
4	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	Predikat/ Nilai LAKIP	A/81,35	BB/75,25	93,00	18.753.242	15.068.903	80,35
		JUMLAH				91,70	18.753.242	15.068.903	80,35
5	Mewujudkan kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek	3.48B	3.41/B	96,8	6.395.453.420	5.518.399.418	86,29
		JUMLAH				96,8	6.395.453.420	5.518.399.418	86,29
Rata -Rata capaian kinerja dengan realisasi anggaran						115,58			71,73

Tabel 51 Realisasi Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		KINERJA	ANGGARAN
1	Persentase peningkatan teknologi informasi dan komunikasi	76,00 %	3.955.355.132
2	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai	100,00%	12.444.258.100
3	Persentase ketersediaan data statistik	100,36%	165.402.020
4	Nilai SAKIP	BB/75,25	18.753.242
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.41/B	6.395.453.420
TOTAL			22.979.221.914

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran hingga 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Berdasarkan akuntabilitas keuangan dari Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 Sebesar Rp 22.979.221.914 untuk mendanai 5 (Lima) program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 27 (Dua puluh tujuh) Sub Kegiatan diluar dari penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 3.608.757.130 sedangkan yang mendukung IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaen Natuna dari (DPPPA) jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp **13.100.198.349** (67,63%) sedangkan capaian kinerja sebesar 129,14% (rata-rata capaian IKU).

Data Rincian dari penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel Dibawah ini :

Tabel 52 Akuntabilitas Keuangan berdasarkan Indikator Program

NO.	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR SASARAN				ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Presentase Layanan Kesekretariatan yang sesuai SOP	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6.414.206.662	5.533.468.321	86,27
		1.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		568.858.758	457.435.721	80,41
		1.	2.06	.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	43.080.200	30.882.500	71,68
		1.	2.06	.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.080.400	29.774.400	59,45
		1.	2.06	.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.016.900	24.148.850	65,24
		1.	2.06	.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	438.691.258	372.629.291	84,94
		1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.098.123.800	112.275438	97,82
		1	2.07	.05	Pengadaan Mebel	455.923.800	356.961.250	78,29
		1	2.07	.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	592.200.000	515.485.000	87,05
		1	2.07	.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	49.224.000	98,45
		1.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		790.314.520	764.899.170	96,78
		1	2.08	.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.717.000	34.127.500	73,05
		1	2.08	.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	46.190.000	26.427.220	57,21
		1	2.08	.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	681.800.000	631.288.697	92,59
		1.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		344.996.732	65.476.511	77,06
		1.	2.09	.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.696.732	59.807.419	51,17
		1.	2.09	.06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	21.500.000	3.920.000	18,23

		1.	2.09	.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	206.800.000	00	0,00
2.	Nilai Laporan LKJ	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			18.753.242	15.068.903	80,35
		1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.753.242	15.068.903	80,35
		1	2.01	.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.753.242	15.068.903	80,35
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah	2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			12.444.258.100	9.644.295.594	77,50
		2.	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.444.258.100	9.644.295.594	77,50
		2.	2.01	.02	Monitoring opini dan aspirasi publik	136.126.000	71.880.020	52,80
		2.	2.01	.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi pemerintah Daerah	29.549.000	11.624.800	39,34
		2.	2.01	.04	Pengelolaan Konten dan perencanaan media komunikasi publik	7.700.347.100	7.121.020.970	92,48
		2.	2.01	.08	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Pulik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.578.236.000	2.439.769.804	53,29
4.	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			3.898.199.752	1.196.248.297	30,69
		3.	2.01		Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.593.583.972	938.547.330	26,12
		3.	2.01	.01	Pendaftaran nama domain pemerintah Kabupaten/Kota	270.989.572	75.922.132	28,02

		3.	2.01	.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.322.594.400	862.625.198	25,96
		3.	2.02		Pengeloaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304.615.780	257.700.967	84,60
		3.	2.02	.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	46.470.000	23.272.412	50.08
		3.	2.02	.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	12.799.900	1.205.900	9,42
		3.	2.02	.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	245.345.880	233.222.655	95,06
5.	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			165.402.020	79.101.414	48,82
		2.	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	165.402.020	79.101.414	47,82
		2.	2.01	.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	107.826.430	60.153.400	55,79
		2.	2.01	.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	57.575.590	18.948.014	32,91
6.	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			57.155.380	30.906.334	54,07
		2.	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.155.380	30.906.334	54,07
		2.	2.01	.01	Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.155.380	30.906.334	54,07
TOTAL						19.370.464.784	13.100.198.349	67,63
Pagu Anggaran DPPA						22.979.221.914	16.484.019.960	71,73

Penutup

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna selama tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan pencapaian keuangan mencapai 71,73%. Hal ini terlihat dari banyaknya indikator kinerja yang berhasil melebihi target yang ditetapkan serta adanya peningkatan capaian. Proses penyebaran data dan informasi secara elektronik melalui website dan media sosial telah dilakukan secara aktif. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam laporan dan perencanaan. Sementara itu, terkait dengan peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Diskominfo mengalami peningkatan yang signifikan, dari 2,90 menjadi 3,61 pada tahun 2024, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 3,10.

Selanjutnya pencapaian pemasangan jaringan intra/internet pemkab natuna Tahun 2024 sudah Mencapai sebanyak 47 OPD dimana titik fokus terletak pada perawatan dan pemeliharaan jaringan dan melakukan koordinasi ke pusat maupun ke pihak operator telekomunikasi dalam hal perbaikan dan peningkatan jaringan internet pada daerah2 yang mengalami gangguan terhadap sinyal, serta adanya 2 Kecamatan baru hanya 1 yang baru terlayani dalam pelayanan internet, Sedangkan untuk jumlah Berita/informasi yang dipublikasikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mengadakan Kerjasama dengan 75 Media yang terdiri dari media cetak dan media online dimana ini mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah 60 Media yaitu media online Pencapaian peningkatan juga dirasakan pada pemberitaan dari jurnalis Kominfo yang diupload dalam website www.natunakab.go.id maupun www.diskominfo.natunakab.go.id. Tahun 2024 ini telah dibuat oleh tim jurnalis berjumlah 1.222 dengan rincian Publikasi Media Sosial ada 614 Berita dan Publikasi melalui Website adalah 197 Berita.

Kemudian untuk pencapaian ketersediaan data statistik sektoral yang terupdate dengan pencapaian berupa :

1. Buku (Informasi Data Kabupaten Natuna Tahun 2024)
2. Website <https://satudata.natunakab.go.id/> dan <https://statistik.natunakab.go.id/> pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam pengumpulan data dan informasi statistik. Sebanyak 275 data berhasil terkumpul meskipun kurang dari target yaitu sebanyak 276 data yang ditetapkan, yang berasal dari 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercatat. Selain upaya pengumpulan data, proses pembaruan ketersediaan data statistik sektoral juga dilakukan setiap tahunnya, terdapat peningkatan

dalam jumlah data yang disajikan, dengan metode pengumpulan, validasi, dan sinkronisasi data yang dilakukan bersama produsen data (OPD terkait). Hasilnya telah dipublikasikan melalui website resmi <https://satudata.natunakab.go.id/>. Sebelumnya, telah dibuat domain lain dengan alamat <https://statistik.natunakab.go.id/> untuk memfasilitasi akses data bagi pihak yang berkepentingan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menetapkan sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja Utama (IKU) dengan 2 sasaran dengan indikator Umum sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh untuk mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Langkah-langkah/rencana aksi yang perlu diambil untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan termasuk dalam menetapkan indikator dan target kinerja sesuai dengan pedoman penjenjangan kinerja instansi pemerintah untuk mendapatkan kinerja yang lebih proporsional hingga mendapatkan proses/aktivitas yang tepat dan berbagi kinerja organisasi sesuai Permenpan RB No 89 Tahun 2021 dan menyiapkan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika dan peraturan lainnya serta memperdalam pengkajian baik dari sisi biaya maupun manfaat pada tiap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta melakukan penetapan target kinerja yang realistis berdasarkan kajian tersebut;
2. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur secara berkala;

3. Untuk peningkatan akses internet Desa dilakukan dengan cara mengusulkan peningkatan akses jaringan ke penyedia jasa telekomunikasi, CSR maupun ke BAKTI Kementerian Kominfo.
4. Perlu dibangun jaringan e-government secara berkelanjutan dan perawatan jaringan yang telah dibangun untuk seluruh OPD dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitasi teknologi informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik serta rencana penerapan aplikasi yang terintegrasi antar OPD sekaligus efisiensi anggaran belanja internet yang sebelumnya dianggarkan pada masing-masing OPD.
5. Meningkatkan kualitas berita/informasi yang ditampilkan dalam website dengan selalu update berita/informasi terbaru kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Natuna, mengingat pada saat ini kebutuhan akan informasi dan media pengakses informasi semakin banyak dan mudah diperoleh.
6. Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaa fungsi PPID dan SP4N Lapor di Kabupaten Natuna.
7. Perlunya sosialisasi maupun bimbingan teknis berkelanjutan dalam bidang TIK baik untuk aparatur pemerintah, sekolah maupun masyarakat.
8. Perlunya peningkatan kompetensi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/ satuan kerja/ organisasi/ komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
10. Perlunya peningkatan Kualitas data yang akan dimanfaatkan oleh setiap kepentingan dan menyediakan data yang berkualitas serta terupdate.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Natuna



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

